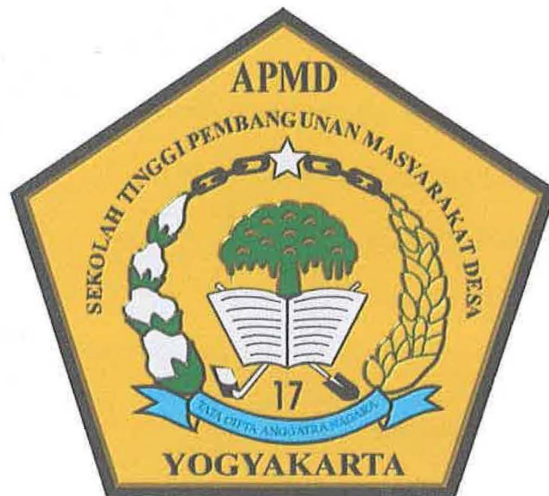


IMPLEMENTASI PROGRAM DESA PRENEUR DALAM PENGEMBANGAN USAHA MASYARAKAT

(Studi Kualitatif di Kalurahan Wiladeg Kapanewon Karangmojo Kabupaten

Gunungkidul)

SKRIPSI



Disusun Oleh:

RONALD UMBU HADANGA

19520167

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA APMD
YOGYAKARTA**

2024



IMPLEMENTASI PROGRAM DESA PRENEUR DALAM PENGEMBANGAN USAHA MASYARAKAT

(Studi Kualitatif di Kalurahan Wiladeg Kapanewon Karangmojo Kabupaten

Gunungkidul)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)

Program Studi Ilmu Pemerintahan



Disusun Oleh:

RONALD UMBU HADANGA

19520167

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”**

YOGYAKARTA

2024

HALAMAN PERNYATAAN

Skripsi ini telah di uji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 09 Agustus 2024

Jam : 10:30 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

Nama

Tanda Tangan

Dra. B. Hari Saptaning Tyas, M.si.
Ketua Penguji / Pembimbing

Dr. Tri Nugroho Emanuel Widayat
Penguji Samping I

Analius Giawa, S.IP., M.Si
Penguji Samping II

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



(Dr. Gregorius Sahdan, M.A)

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RONALD UMBU HADANGA

NIM : 19520167

Program Studi : Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Implementasi Program Desa Preneur Dalam Pengembangan Usaha Masyarakat” adalah benar-benar hasil kerja saya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 5 Agustus 2024

Membuat Pernyataan


Ronald Umbu Hadanga

MOTTO

“Untuk Segala Sesuatu Ada Masanya, Untuk Apapun Di Bawah Langit Ada Waktunya”

(Pengkhotbah 3:1)

“If We Don’t Take Action Now, We’ll Settle For Nothing Later”

(Settle For Nothing — Rage Against The Machine)

“Jangan Kau Penjarakan Ucapanmu Dan Menghamba Pada Ketakutan, Itu Hanya Akan Memperpanjang Barisan Perbudakan”

(Wiji Thukul)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji syukur saya haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, karunia, perlindungan, dan tuntunan-Nya selama ini sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini akan saya persembahkan sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih kepada orang yang selama ini yang senantiasa memberikan motivasi, dukungan, kekuatan dan doa dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, dan juga doa berbagai pihak, terutama:

1. Terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang yang sangat berharga dalam kehidupan saya yaitu kedua orang tua saya, Bapak **UMBU BULLA** dan Ibu **RAMBU TEBA** yang sudah berjuang dan bersusah payah membesarkan saya dengan penuh kasih sayang dan mendidik saya dengan sabar. Terima kasih untuk do'a dan motivasi yang Bapak Mama berikan kepada saya, mungkin tanpa doa dan dorongan dari Bapak Mama skripsi tidak akan selesai dengan baik. Terima kasih juga sudah banyak bekerja keras untuk memfasilitasi semua kebutuhan saya dan senantiasa mendoakan dan mengupayakan kesehatan saya. Skripsi ini mungkin belum setimpal dengan semua yang Bapak Mama berikan kepada saya. Semoga Bapak Mama sehat selalu dan dipermudah dalam segala urusannya. kiranya Tuhan selalu melindungi dan memberkati Bapak Mama, Amin. Sekali lagi terima kasih.
2. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kakak dan juga Adik saya, yaitu Kakak Kristofel U. T. Taranggua, Dewy Dambo, Urdan U. Sawola, Dewy Rambu

Makka, Nicholas U. Dondu, Titin Rambu Tingga, serta Adik Saya Ineke Rambu Tawunga, Jenifer Rambu Ata Djama, Andini, Hana dan Juga Rius Bandel. Atas dukungan, do'a, dan segala bantuan buat saya selama saya menyelesaikan studi. Semoga Tuhan Yesus Senantiasa memberikan Kesehatan, dan Berkat yang melimpah atas semua hal baik yang dilakukan.

3. Terima kasih untuk Sahabat dan Teman-teman saya, Vijay U. Jorumana, Yandi Eleison, Dicky U. Laiya, Audi Uspek, Elsavan U. Siwa, Rusdyanto Tarambani, Umbu Nanda, Irhamnudin, Muliadin, Rian Santula, Sean Sabaora, Micky Ezakta, Umbu Priyono, Ian Yabid, Aldi Sokko, Aqmal, Andianse U. Hula, Rifal U. Takadjanji, Dartono Bokamanu, Derivat U. Siwa, Albert Ganteng Akhyar Wong Lanang, Wahyu Siregar. Atas dorongan, bantuan dan juga semangat yang terus ditularkan dalam setiap proses saya dinamika dan dialektika saya dalam menyelesaikan studi ini. Semoga kalian semua selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa, Amin.
4. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Keluarga Besar Wailanggi Kakek, Nenek, Bapak, Mama, Kakak dan semua saudara saya yang selalu mendukung dan mendoakan saya dalam saya berproses. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa Memberikan Kesehatan dan Berkat yang berkecukupan, Amin.
5. Terima kasih kepada SERIKAT MAHASISWA INDONESIA (SMI) Komisariat APMD dan Cabang Yogyakarta yang sudah menjadi rumah ideologis untuk saya belajar dan berdinamika selama ini. Semoga terus membela kepentingan rakyat dan melawan penindasan demi mewujudkan cita-cita bersama Pembebasan

Nasional Melawan Imprealisme. Untuk itu, maka tetaplah menjadi Cerdas Militer dan Rakyat.

6. Kepada teman-teman saya Gailar Angkatan 19, Maleakhi, Elshaday, Riswan, Rizal U. Moto, Arto Pawolung, Redy, Migel, Dani, Chelsy. Terima kasih untuk setiap kebersamaan selama saya menjalankan studi saya di Yogyakarta
7. Terima kasih kepada Gailaru Marada Yogyakarta, Magena Ta Jogja, Keluarga Mamoru Jogja yang sudah menjadi wadah yang mempertemukan dalam menjalin silaturahmi kita seluruh mahasiswa asal Sumba Tengah. Semoga semakin solid dan terus menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan.
8. Terima kasih kepada Organisasi Sumba APMD sudah menjadi wadah belajar selama saya menempuh studi di kampus ini. Semoga tetap solid dan menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan.
9. Terima kasih juga saya sampaikan kepada kekasih saya Rambu Rany yang juga turut memberikan semangat, do'a serta menyemangati saya dalam menyelesaikan studi saya. Semoga Tuhan Yesus selalu menambah hikmat dan memberkati hubungan kita berdua, Amin.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas Berkat dan Rahmat serta Anugerahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “IMPLEMENTASI PROGRAM DESA PRENEUR DALAM PENGEMBANGAN USAHA MASYARAKAT” di Kalurahan Wiladeg, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis berharap bagi siapapun yang membaca karya ini dapat memberikan masukan dan terus mengembangkannya guna. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, doa, bimbingan dan saran yang berguna dalam proses penyusunan skripsi ini. maka, dengan segenap kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta sebagai tempat penulis berproses, belajar dan menimba ilmu
2. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si. selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Gregorius Sahdan, M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
4. Ibu Dra. B. Hari Saptaning Tyas, M.Si. selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan juga pikiran dalam memberikan bimbingan selama proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Ibu selalu dan senantiasa diberikan Kesehatan dan dalam lindungan Tuhan Yesus, Amin.
5. Bapak Dr. Tri Nugroho Emanuel Widayat selaku dosen penguji satu. Terimakasih atas koreksi, evaluasi, dan sarannya guna penyempurnaan skripsi ini.
6. Bapak Analius Giawa, S.IP., M.Si selaku dosen penguji dua. Terimakasih atas koreksi, evaluasi, dan sarannya guna penyempurnaan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen Prodi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang telah membekali banyak pengetahuan selama menempuh Pendidikan di kampus ini.
8. Pemerintah dan Masyarakat di Kalurahan Wiladeg yang telah memberikan ruang dan waktu serta menjadi teman diskusi selama penulis melaksanakan penelitian.
9. Semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam penulisan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xi
INTISARI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Fokus Penelitian	6
D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian	6
E. <i>Literatur Review</i>	7
F. Kerangka Konseptual	13
1. Pemerintahan Desa.....	13
2. Implementasi	14
3. Desa Preneur	17
G. Metode Penelitian	21
1) Jenis Penelitian.....	21
2) Objek dan Subjek Penelitian	22
3) Tempat Penelitian.....	23
4) Teknik Pengumpulan Data.....	24
5) Teknik Analisis Data.....	27

BAB II PROFIL KALURAHAN WILADEG	30
A. Sejarah Kalurahan Wiladeg	30
B. Kondisi Geografis	31
C. Kondisi Demografi	32
D. Struktur Pemerintah Kalurahan	40
E. Struktur Kelompok Desa Preneur	42
F. Visi dan Misi Kalurahan Wiladeg	46
G. Strategi kebijakan	47
BAB III ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM DESA PRENEUR DALAM PENGEMBANGAN USAHA MASYARAKAT DI KALURAHAN WILADEG	70
A. Kondisi Lingkungan Tempat Pelaksanaan Program Desa Preneur	70
B. Hubungan Antar Lembaga Dalam Implementasi Program Desa Preneur	75
C. Sumberdaya Guna Implementasi Program Desa Preneur	78
D. Karakteristik Dan Kemampuan Agen Pelaksana Program Desa Preneur	82
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Daftar Informan Penelitian.....	20
Table 2.1 Jumlah Penduduk Kalurahan Wiladeg.....	28
Table 1.2 Mata Pencarian Masyarakat Wiladeg.....	29
Table 2.3 Data Penerima Manfaat BLT Kalurahan Wiladeg 2024.....	30
Table 2.4 Tingkat Pendidikan.....	31
Table 2.5 Kepercayaan Masyarakat Wiladeg.....	33
Table 2.6 Data Personal Pemerintah Kalurahan.....	35
Table 2.7 Struktur Kepengurusan Kelompok Preneur Wiladeg.....	37
Table 2.8 Data Pelaku Usaha Kelompok Preneur Wiladeg.....	38
Tabel 2.9 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Wiladeg 2024.....	46
Gambar 2.1 Bagan Struktur Pemerintah Kalurahan.....	34

INTISARI

Dalam proses pengembangan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya di Yogyakarta, pemerintah memfokuskan pada empat pilar. Adapun keempat pilar Desa/Kalurahan Mandiri Budaya yaitu Desa Budaya, Desa Wisata, Desa Prima dan Desa Preneur. Dari keempat pilar tersebut peneliti memfokuskan penelitian ini pada pengembangan Desa Preneur. Berdasarkan Pergub D.I.Y Nomor 93 Tahun 2020, Desa preneur merupakan desa yang memiliki kemampuan untuk menumbuhkan unit-unit usaha skala desa, yang diusahakan oleh warga desa itu sendiri melalui penguatan pengetahuan dan keterampilan berwirausaha, peningkatan mutu produk/jasa, nilai tambah dan daya saing dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian desa dan tercapainya kesejahteraan hidup warga.

Dalam penelitian ini, peneliti metode penelitian kualitatif deskriptif. Kualitatif deskriptif adalah mengungkapkan fakta dan kondisi lapangan secara detail dan terperinci mengenai permasalahan yang hendak diteliti. Objek penelitian ini yaitu bagaimana Implementasi Program Desa Preneur Dalam Pengembangan Usaha Masyarakat di Kalurahan Wiladeg, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul.

Hasil dari penelitian ini terbagi menjadi empat bagian menurut fokus penelitian. Pertama, Kondisi Lingkungan Tempat Pelaksanaan. Hasilnya memperlihatkan bahwa Kalurahan Wiladeg memiliki potensi besar karena wiladeg dilewati jalur wisata menuju Goa Pindul dan Umbul Banteng, namun partisipasi masyarakat dalam program desa preneur masih minim sehingga implikasi terhadap peningkatan kualitas usaha dan kualitas hidup masih belum berdampak secara signifikan. Kedua, Hubungan Antar Lembaga. Hasilnya, dalam pelaksanaan program desa preneur belum ada satu hubungan kemitraan yang dibangun. Sehingga pada para pelaku usaha minim dukungan dalam bentuk teknis maupun non teknis untuk semakin memajukan pengembangan usaha masyarakat. Ketiga, Sumberdaya Guna Implementasi. Hasilnya, bahwa dalam upayakan mendukung implementasi program desa preneur, pemerintah kalurahan mencanangkan pengadaan tenda penjualan bagi para pelaku usaha preneur wiladeg. Namun, dari hasil pengamatan dan juga wawancara, banyak dari pelaku usaha yang terkendala dalam aspek permodalan dalam pengembangan usaha. Keempat, berkaitan dengan Karakteristik dan Kemampuan Agen Pelaksana. Hasilnya, dalam Implementasi Program Desa Prenuer masih banyak para pelaku usaha yang tidak memiliki kompetensi yang memadai dalam memanfaatkan platform digital untuk memperluas jangkauan pemasaran dalam rangka memajukan produktifitas usahanya masing-masing. Dengan hasil yang ada di atas, maka perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah dalam memerhatikan empat aspek yang memengaruhi kinerja ataupun dampak dari sebuah program atau kebijakan. Yang pada konteks ini mengupayakan pengembangan usaha masyarakat yang berbasis pada implementasi program desa preneur, untuk mewujudkan desa yang mampu menggeliatkan kegiatan berwirausaha guna memajukan dan meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan.

Kata kunci: Implementasi, Desa Preneur, Pengembangan Usaha

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia telah menetapkan bahwa pembangunan Desa merupakan salah satu aspek penting dalam upaya memajukan negara dan bangsa. Salah satu komitmen pemerintah untuk pembangunan wilayah perdesaan dapat dilihat dari lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan UU ini, disebutkan bahwa Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep pembangunan Desa pun kemudian diarahkan berdasarkan asas rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan berkelanjutan.

Asas-asas di atas akan bersinergi dalam proses pembangunan Desa guna mewujudkan kemajuan Desa dan masyarakat setempat secara komprehensif dan berjangka panjang. Hal ini sejalan dengan yang diamanatkan dalam UU Desa bahwa pembangunan Desa diorientasikan sebagai upaya peningkatan hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Dengan demikian, maka segala upaya terus dikembangkan oleh pemerintah – terutama

pemerintah Desa melalui berbagai kebijakan dan program pembangunan di tingkatan perdesaan guna menciptakan transformasi perubahan yang lebih baik kedepannya. Di Daerah Istimewa Yogyakarta misalnya, salah satu upaya untuk meningkatkan proses pembangunan Desa dapat dilihat melalui diterbitkannya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta tidak saja dikenal sebagai kota istimewa, tetapi juga dikenal sebagai kota budaya. Bahkan, karena kebudayaannya yang khas dan unik inilah yang kemudian melengkapi keistimewaan Yogyakarta itu sendiri. Lahirnya kebijakan “Desa/Kalurahan Mandiri Budaya” juga sejalan dengan Pergub DIY No. 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan. Berdasarkan Pergub DIY No. 93/2020 pada pasal 1 menjelaskan bahwa Desa/Kalurahan Mandiri Budaya adalah desa/kalurahan mahardika, berdaulat, berintegritas dan inovatif dalam menghidupi dan mengaktualisasikan nilai-nilai keistimewaan melalui pendayagunaan segenap sumber daya dan kebudayaan yang dimiliki dengan melibatkan partisipasi aktif warga dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan kelestarian semesta ciptaan, kesejahteraan dan ketentraman warga dalam ke-bhinekatunggal-ika-an.

Dalam proses pengembangan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya di Yogyakarta, pemerintah memfokuskan pada empat pilar. Adapun keempat pilar Desa/Kalurahan Mandiri Budaya yaitu Desa Wisata, Desa Budaya, Desa Prima

dan Desa Preneur. Dari keempat pilar tersebut peneliti memfokuskan penelitian ini pada pengembangan Desa Preneur. Berdasarkan Pergub D.I.Y Nomor 93 Tahun 2020, Desa preneur merupakan desa yang memiliki kemampuan untuk menumbuhkan unit-unit usaha skala desa, yang diusahakan oleh warga desa itu sendiri melalui penguatan pengetahuan dan keterampilan berwirausaha, peningkatan mutu produk/jasa, nilai tambah dan daya saing dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian desa dan tercapainya kesejahteraan hidup warga.

Oleh karena itu, dengan adanya Pergub D.I.Y Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya mendorong Kalurahan/Desa yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk turut mengupayakan penguatan dan pengembangan unit-unit usaha yang digerakan melalui Program Desa Preneur. Dalam penelitian ini peneliti hendak melakukan penelitian di Kalurahan Wiladeg, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan hasil observasi peneliti terkait implementasi Program Desa Preneur. Sejak diberlakukannya Pergub D.I.Y Nomor 93 Tahun 2020, Lalu Pemerintah Desa membentuk Kelompok Desa Preneur di Kalurahan Wiladeg yang digerakan oleh masyarakat desa. Kelompok Desa Preneur terdiri dari berbagai unit-unit usaha yang bergerak di berbagai sektor – mulai dari kerajinan, makanan dan juga jasa, diantaranya kerajinan wayang dan gamelan, usaha produksi aksesoris dekorasi, jasa penyewaan alat musik marching band, jasa rias, produksi sangkar burung, kerajinan dari kayu, dan juga olahan makanan dari lidah buaya yang

merupakan produk UMKM unggulan yang gerakan melalui program desa preneur.

Namun didalam implementasinya, upaya penguatan dan pengembangan unit-unit usaha yang ada di Kalurahan Wiladeg belum menunjukan satu kemajuan yang signifikan, baik dalam peningkatan ekonomi masyarakat maupun pemerintahan di Kalurahan Wiladeg. Hal ini dikarenakan beberapa unit-unit usaha yang di organisasikan melalui Kelompok Desa Preneur masih menghadapi kendala dalam hal metode penjualan yang belum maksimal, banyak dari pelaku usaha yang masih berjualan menggunakan cara konvensional/berjualan langsung pada event tertentu. Misalnya, Rasulan, Bersih Desa dan event kalurahan maupun kapanewon sebagai sarana utama dalam menjajakan produk-produk yang ada di kelompok desa preneur wiladeg – tanpa mempertimbangkan dan menyesuaikan perkembangan serta kemajuan teknologi dengan skema digital marketing, yang sebenarnya apabila dapat dimanfaatkan maka akan meningkatkan efektivitas dan memperluas akses dalam berwirausaha bagi para pelaku usaha yang ada di Kalurahan Wiladeg.

Hal ini juga kemudian berdampak pada kemunduran stabilitas produktivitas para pelaku usaha, banyak dari para pelaku usaha tidak menjalankan usahanya secara berkelanjutan. Misalnya pada satu unit usaha olahan makanan dari lidah buaya yang merupakan satu produk unggulan yang digalakan oleh pemerintah Kalurahan Wiladeg. Banyak dari ibu-ibu yang merupakan penggerak usaha makanan dari lidah buaya yang meninggalkan usaha mereka – dikarenakan

belum memiliki rumah produksi sebagai sentral produksi dan terutama ketidakpastian dalam hal manajemen pemasaran yang tidak maksimal sehingga memaksa pelaku usaha untuk kembali menggarap sawah dan juga kebun untuk memaksimalkan pendapatan masyarakat.

Dalam penelitian ini juga, peneliti hendak menggunakan satu dari lima perspektif mazhab APMD atau yang lebih dikenal dengan Mazhab Timoho, yakni Governing sebagai pisau analisis peneliti dalam melihat bagaimana praktik baik secara taktis maupun strategis kebijakan pemerintah dalam mengupayakan pengembangan usaha masyarakat melalui program desa preneur yang ada di Kalurahan Wiladeg. Sebab bagaimana pun pemerintah memiliki peran serta tanggung jawab dalam mengupayakan program-program yang telah dibuat dapat selaras dengan program pembangunan yang ada di atasnya.

Berkaitan dengan persoalan di atas, peneliti hendak melihat lebih jauh mengenai implementasi program desa preneur yang ada di kalurahan wildeg.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari persoalan di atas, maka peneliti menarik rumusan masalah, yakni: Bagaimana Implementasi Program Desa Preneur Dalam Pengembangan Unit-Unit Usaha di Kalurahan Wiladeg, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, D.I.Y?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada:

- a) Kondisi lingkungan tempat pelaksanaan Program Desa Preneur di Kalurahan Wiladeg
- b) Hubungan antar lembaga dalam implementasi Program Desa Preneur
- c) Sumberdaya Guna Implementasi Program Desa Preneur
- d) Karakteristik dan Kemampuan Agen Pelaksana Program Desa Preneur di Kalurahan Wiladeg

D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguraikan mengenai bagaimana Implementasi Program Desa Preneur dalam Pengembangan Unit-Unit Usaha yang ada di Kalurahan Wiladeg, adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Akademis diharapkan dapat dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan mengenai pengembangan unit-unit usaha yang berbasiskan pada Program Desa Preneur di Kalurahan Wiladeg

- b. Secara Praktis digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi implementasi program desa preneur dalam pengembangan unit-unit usaha yang ada di Kalurahan Wiladeg

E. Literatur Review

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan beberapa literatur guna menghimpun, mengkomparasikan beberapa sumber penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian yakni implementasi program desa preneur dalam pengembangan usaha masyarakat di Kalurahan Wiladeg. Adapun beberapa literatur review yang peneliti gunakan akan diuraikan sebagai berikut:

Pertama, dalam Jurnal Abdimas Bina Bangsa yang ditulis oleh Budi Ilham Maliki Dkk (2020), dengan judul “Pengentasan Kemiskinan Melalui Social Preneur Bagi Ibu-Ibu PKK”. Dalam penelitian ini peneliti menguraikan bagaimana upaya pengentasan kemiskinan melalui pendekatan pemberdayaan Ibu-Ibu PKK dengan menumbuhkan kembangkan *Social Preneur*, yang mana dengan memberikan pelatihan keterampilan sesuai permintaan mitra – agar kemudian mitra dapat menghasilkan produk unggulan yang memiliki nilai ekonomis dan dibutuhkan pasar, selain itu juga produk yang dihasilkan tidak hanya dipasarkan namun juga untuk konsumsi rumah tangga sehingga mengurangi beban pengeluaran mitra dalam hal konsumsi rumah tangga

Kedua, dalam Jurnal Pengabdian Inovasi Masyarakat Indonesia yang ditulis oleh Sudirman dkk (2022) dengan judul “Kare –Kare: Pengembangan Desa Preneur Berbasis Inovasi Makanan Khas Lombok (Kare-Kare) Masyarakat Di Desa Sukadana Kecamatan Pujut Kabupaten Loteng Nusa Tenggara Barat”. Dalam penelitian ini hanya melihat satu unit usaha masyarakat saja yakni usaha makanan khas masyarakat Desa Sukadana. Dalam penelitian ini peneliti tidak hanya berfokus melihat satu unit usaha saja, tetapi hendak melihat secara komprehensif/menyeluruh terkait bagaimana pengembangan usaha masyarakat yang berbasiskan pada program desa preneur.

Ketiga, dalam Jurnal Prosiding Seminar Nasional Gelar Wicara yang ditulis oleh Ardha Naufal Herdyansa Dkk (2023), dengan judul “Pengembangan Gula Aren Untuk Membangun Desa Preneur Di Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat”. Dalam penelitian ini berfokus pada optimalisasi satu produk/unit usaha yakni Geria Gula Semut (GGS) yang merupakan salah satu produk lokal di Desa Dasan Geria yang diproduksi secara tradisional. Dalam penelitian sendiri, peneliti ingin bagaimana dampak program desa preneur terhadap optimalisasi dan pengembangan usaha masyarakat di Kalurahan Wiladeg.

Keempat dalam Jurnal Prosiding National *Seminar on Accounting Finance, and Economics* (NSAFE) yang ditulis oleh Muhammad Abdi Munsyii Dkk (2022) dengan judul “(SAKU) Sistem Akuntansi UMKM:

Model *Cloud Accounting System* Sederhana sebagai Strategi Optimalisasi Pengembangan Desa Preneur”. Dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa implementasi desa preneur yang dilakukan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat masih menemui banyak tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh masyarakat kalurahan ngalang lumintu, khususnya dalam pengelolaan keuangan UMKM mengingat kualitas sumberdaya manusia di desa yang tertinggal – oleh sebab itu peneliti merekomendasikan dibentuknya sistem akuntansi sederhana dengan model cloud accounting system sebagai upaya untuk mendukung pengembangan program desa preneur.

Kelima dalam Jurnal Media Wisata yang ditulis oleh Lien Maulana (2022) dengan judul “Pengelolaan Desa Wisata Pandanrejo Menuju Desa Preneur”. Dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa dalam mengembangkan Desa Wisata Pandanrejo sebagai desa preneur diupayakan melalui kelompok dan keanggotaan wirausaha desa, penguatan kapasitas dan kualitas produk/jasa, tata kelola keuangan, pembinaan dana pendamping desa, benchmarking pemasaran dan promosi demi keluasan dampak dan keberlanjutan. Pada penelitian ini sendiri peneliti secara khusus pada bagaimana implementasi program desa preneur dalam pengembangan unit-unit usaha yang ada di Kalurahan Wiladeg.

Keenam, dalam Jurnal Prosiding Pepadu yang ditulis oleh Handayani Rinuastuti Dkk (2023) dengan judul “Peremberdayaan Masyarakat Desa Bengkaung Dalam Program Pengembangan Desa Preneur”. Dalam penelitian

ini peneliti menguraikan bagaimana program pemberdayaan yang digalakan melalui kegiatan pengabdian masyarakat dalam mengembangkan Desa Bengkaung sebagai desa preneur. Adapun metode yang digunakan antara lain: Penyuluhan terhadap masyarakat terkait manajemen/tata kelola organisasi, Pendampingan melalui praktek tata kelola usaha, dan Evaluasi dan Peningkatan Kemandirian.

Ketujuh, dalam Jurnal Kependudukan dan Kebijakan yang ditulis oleh Sita Agung Trisnantari Dkk (2023) dengan judul “*Collaborative Governance Process in MSMEs Empowerment through Desa-Preneur Program in Sidoarum Village, Yogyakarta*”. Dalam penelitian ini membahas proses collaborative governance dalam pelaksanaan Program Desa Preneur di Desa Sidoarum dan didapatkan hasil bahwa indikator tata kelola tidak dilaksanakan secara maksimal. Pertama peran pemerintah lokal dalam hal ini lurah sebagai pemimpin program yang ada di wilayahnya tidak maksimal dalam mengawal program, kedua tidak semua para pelaku UMKM terintegrasi dalam kegiatan pendampingan pengembangan usaha melalui program desa preneur dan juga kelembagaan desa yang berkaitan dengan ekonomi desa yang belum terbentuk. Hal-hal ini kemudian berpengaruh terhadap proses implementasi program desa preneur yang tidak berdampak secara signifikan terhadap pengembangan usaha para pelaku UMKM.

Kedelapan, didalam jurnal Prosiding Seminar Gelar Wicara yang ditulis oleh Rizki Dwi Saputra Dkk (2023) dengan judul “Pengelolaan Jagung

Menjadi Produk Susu Jagung Instan Untuk Mendukung Program Desa Preneur di Desa Suela Kecamatan Suwela Kabupaten Lombok Timur”. Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan hasil bahwa pada Desa Suela potensi produk-produk olahan pangan seperti olahan dari jagung belum dikembangkan secara maksimal karena proses pengelolaan yang masih sangat tradisional tanpa memberikan sentuhan inovasi dan teknologi yang dapat meningkatkan jumlah dan produktivitas penjualan sehingga dapat menjadi penggerak ekonomi dalam Desa Suela. Maka dari itu program yang dilakukan untuk menjawab masalah tersebut dengan memberikan penyuluhan, pelatihan, dan juga pendampingan terhadap pelaku usaha olahan jagung.

Kesembilan, dalam Jurnal Prosiding Gelar Wicara yang ditulis oleh Faroja Insani Zainie Dkk (2023) dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Pengelolaan Gula Aren Sebagai Produk Unggulan di Desa Dasan Geria”. Penelitian ini menguraikan bagaimana salah satu potensi produk lokal yakni gula aren yang di produksi oleh masyarakat Desa Dasan Geria masih belum mampu mengembangkan tata produksi dan pemasaran secara maksimal. Hal ini kemudian dicoba dikembangkan melalui sosialisasi kepada para pelaku usaha terkait bagaimana menciptakan inovasi dalam hal pengemasan, varian rasa, dan juga teknik promosi yang maksimal pada platform digital.

Kesepuluh, pada Jurnal Dedikasi Masyarakat yang ditulis oleh Rahmad Solling Hamid Dkk (2018) yang berjudul “Pemberdayaan Ibu-Ibu

PKK Melalui Social Preneur Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Pettalandung”. Dalam penelitian ini peneliti menguraikan permasalahan yang dihadapi oleh ibu-ibu PKK dan BUMDes dalam rendahnya pengetahuan dan keterampilan social preneurship dalam mengembangkan usaha yang ada. Berangkat dari permasalahan yang ada program yang ditawarkan ialah yang berkaitan dengan peningkatan keterampilan serta pemanfaatan media teknologi informasi, antara lain: pelatihan *social preneurship* yang berorientasi pada pemanfaatan potensi lokal menjadi komoditas yang dapat dikomersilkan, lalu pembuatan blog sebagai media promosi, dan pelatihan pembuatan mesin kabut sarang wallet untuk BUMDes di Desa Pettalandung.

Dari literatur yang ada di atas, peneliti menemukan beberapa kesamaan baik dalam judul dan metode penelitian antara lain terkait pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan desa preneur maupun permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan usaha masyarakat misalnya pada tata kelola produksi hingga pada strategi pemasaran yang tidak maksimal sehingga menjadi penghambat dalam pertumbuhan perekonomian peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan, adapun persamaan lain yakni yang berkaitan dengan bagaimana kehadiran pemerintah desa/kalurahan menjadi salah satu aktor yang mempunyai peran vital dalam memfasilitasi dan memonitoring program yang berjalan.

Namun, dalam penelitian ini juga terdapat beberapa perbedaan dalam penelitian ini. Hal-hal yang dimaksud pun antara lain; pada konteks ruang dan waktu yang mana penelitian ini dilaksanakan di Kalurahan Wiladeg Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul dan juga judul penelitian yang secara khusus ingin meneliti bagaimana implementasi program desa preneur di Kalurahan Wiladeg, hal-hal yang terkait tentang perencanaan sampai pada pelaksanaan program. Sehingga diharapkan dapat memiliki nilai kebaruan dari penelitian ini sendiri.

F. Kerangka Konseptual

1. Pemerintahan Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 1 ayat 2 (dua) menjelaskan pengertian Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat (2) PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan aktivitas masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Merujuk pada pengertian juga ketentuan yang ada di atas maka pemerintahan desa semestinya menjadi aktor utama yang mengurus dan bertanggung jawab akan hal-hal yang

berkaitan dengan penyelenggaraan urusannya dalam membuat maupun mengawal program/kebijakan sesuai dengan kewenangannya.

Adapun penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat tersebut terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat atau desa – sehingga antara Kepala Desa selaku pemerintah desa dan BPD memiliki kedudukan yang sama, yakni sama-sama merupakan kelembagaan/organisasi desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, walaupun keduanya mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda, tetapi mempunyai hubungan yang erat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Maka dari itu Pemerintahan Desa merupakan unsur – unsur penyelenggara roda pemerintahan desa yang berkerja dalam mengatur dan mengurus berbagai urusan guna kepentingan dalam mensejahterahkan masyarakat desa.

2. Implementasi

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah Implementasi biasanya diasosiasikan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan guna mencapai tujuan tertentu. Menurut Nurman Usma, implementasi adalah adanya suatu kegiatan, tindakan,aksi atau mekanisme sistem yang mengarah pada adanya bukan

hanya suatu kegiatan, tetapi suatu kegiatan yang direncanakan dan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan.

Salah satu upaya mewujudkan dalam suatu sistem adalah implementasi. Kebijakan yang telah ditentukan, karena tanpa implementasi sebuah konsep tidak akan pernah terwujud. Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan- keputusan politik ke dalam prosedur – prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu Kebijakan.

G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli (1983), merumuskan faktor-faktor yang memengaruhi kinerja dan dampak dari satu implementasi kebijakan program-program pemerintah yang bersifat desentralistis (G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli dalam Subarsono,2005:101). Faktor-faktor tersebut diantaranya:

a) Kondisi Lingkungan

Lingkungan dari pada implementasi kebijakan sangat memengaruhi hasil yang diinginkan, yang dimaksud dengan lingkungan ini mencakup sosio kultural serta keterlibatan penerima program.

b) Hubungan antar organisasi

Dalam banyak program, implementasi sebuah program memerlukan adanya dukungan yang intens dari instansi lain. Maka dari itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi untuk mencapai target dari sebuah program.

c) Sumberdaya organisasi untuk implementasi program

Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya, baik sumberdaya manusia (human resources) maupun sumberdaya non-manusia (non human resources).

d) Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana

Yang dimaksud dengan karakteristik dan kemampuan agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.

Maka, berdasarkan uraian di atas, implementasi merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah guna mencapai targetan atau tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi berkaitan dengan implementasi kebijakan juga perlu memerhatikan faktor-faktor yang menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan yang diterapkan. Apabila kita ingin mengukur kegagalan atau keberhasilan dari sebuah

implementasi sebuah program dapat dilihat dari faktor-faktor yang memengaruhinya.

3. Desa Preneur

Desa preneur adalah salah satu pilar vital di dalam Program Desa/Kalurahan Mandiri Budaya yang merupakan gagasan terpadu pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang termaktub dalam Pergub D.I.Y No. 93 Tahun 2020. Desa Preneur menjadi salah satu respon terhadap isu kemiskinan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi usaha, peningkatan semangat kewirausahaan dan kualitas SDM para pelaku UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena itu, dengan prioritas pada peningkatan softskill dari para pelaku usaha, program Desa Preneur terwujud dalam bentuk Pendidikan, Pelatihan, Fasilitasi, dan Pendampingan.

Dalam Pergub D.I.Y Nomor 20 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Desa Preneur Dinas Koperasi UKM DIY pada Bagian Maksud dan Tujuan, menjelaskan definisi Desa Preneur sebagai Desa atau Kalurahan yang memiliki kemampuan untuk menggeliatkan dinamika wirausaha ekonomi berbasis potensi dan kearifan lokal, melalui unit usaha untuk dapat dikelola menjadi berkualitas global dengan penguatan kapasitas komunitas masyarakat secara berkelanjutan. Adapun maksud dari pada program desa preneur untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa melaui pengembangan dinamika entrepreneurship dan membantu pengentasan

kemiskinan serta mengurangi pengangguran, melalui pengembangan kapasitas masyarakat secara berkelanjutan. Desa preneur juga dapat digunakan sebagai role model pemberdayaan masyarakat yang terdampak bencana agar pulih dan bangkit melalui pendekatan pemberdayaan ekonomi.

Masih berdasarkan Peraturan Gubernur D.I.Y Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Desa Preneur – terkait Pelaksanaan program dan Materi tahapan daripada Program Desa Preneur. Pelaksanaan program sendiri dilakukan dalam lima tahap, dengan tiga tahap utama. Setiap tahap dilakukan dengan pendampingan yang berbasiskan pada kelompok usaha yang ada pada tiap desa, adapun tahap yang dimaksud sebagai berikut:

- Tahapan Pelaksanaan

Tahapan		Tahun ke-	Definisi
utama	Embrio/penumbuhan	0/1	<ul style="list-style-type: none"> - Tahap embrio dilakukan melalui identifikasi dan pemetaan potensi wilayah - Merupakan tahap awal, atau tahap pengenalan atau pendalaman terhadap potensi desa - Tahap ini bisa dilakukan oleh OPD yang memiliki kompetensi dalam bidang pemberdayaan UMKM di lingkup kabupaten/kota atau provinsi - Dilakukan sosialisasi sekaligus pemahaman

Tahapan		Tahun ke-	Definisi
			tentang dinamika tatakelola wirausaha - Sudah teridentifikasi potensi usaha dan tatakelola usaha (produksi, potensi pasar, dan kelembagaan)
	Pengembangan	2	- Merupakan tahap pengembangan usaha melalui manajemen pemasaran dan strategi usaha yang efektif
	Maju	3	- Merupakan tahap lanjut yang diorientasikan pada promosi usaha dan perluasan jejaring dan kemitraan
Lanjut	Pelepasan	4 atau 5	Tidak ada intervensi sama sekali
	Evaluasi/pembinaan	5 atau 6	Pembinaan pasca tahun ke-4/5 untuk mengetahui dampak usaha terhadap perekonomian wilayah/desa dan keberlanjutan usaha untuk dilakukan kebijakan selanjutnya

- Materi tahapan

Tahapan	Materi Utama yang harus disampaikan
Embrio/Penumbuhan	<ul style="list-style-type: none"> - Tahap penyusunan kajian identifikasi (khusus embrio) - Sosialisasi konsep desa preneur dan sosialisasi kebijakan pemerintah daerah - Manajemen dasar untuk tatakelola kewirausahaan, yakni manajemen perencanaan usaha, manajemen

Tahapan	Materi Utama yang harus disampaikan
	keuangan, manajemen produksi, dan manajemen sumberdaya manusia, termasuk : leadership - Karakter pasar potensial yang akan menjadi sasaran
Pengembangan	- Manajemen pemasaran : sistem pemasaran yang baik - Daya Tarik produk : branding, merek, daya saing, sertifikasi, cara promosi/pengembangan digitalisasi usaha
Maju	- Pengembangan mitra dan jejaring bisnis - Pelaksanaan pemeran usaha

Sumber: Pergub D.I.Y Nomor 20 Tahun 2022

Dari uraian di atas, Desa Preneur dapat artikan sebagai suatu program yang bertujuan untuk membangun wirausaha ekonomi yang dinamis dan juga berdaya saing yang tentu saja berbasiskan kepada potensi dan juga kearifan lokal melalui kerja-kerja pendamping dan penguatan yang langsung diorganisasikan yang dilaksanakan secara berkelanjutan melalui program desa preneur di setiap desa ataupun kalurahan dalam wilayah D.I.Y – yang tidak kalah penting ialah turut memerhatikan proses pelaksanaan dan materi tahapan dalam implementasi program desa preneur sehingga dapat mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan kemandirian ekonomi di masyarakat pedesaan.

G. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Ali dan Yusof (2011) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai: *Any investigation which does not make use of statistical procedures is called “qualitative” nowadays, as if this were a quality label in itself*. Definisi dari Ali dan Yusof tersebut mengerucutkan pada ketidakhadiran penggunaan alat-alat statistik dalam penelitian kualitatif. Hal ini tentunya guna memudahkan dalam membedakan penggunaan metode kualitatif dengan penggunaan metode kuantitatif. Karena metode kuantitatif bergantung pada penggunaan perhitungan dan prosedur analisis statistika.

Sementara itu, metode kualitatif lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat terpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan. Oleh karena itu, Basri (2014) menyimpulkan bahwa fokus dari penelitian kualitatif adalah pada prosesnya dan pemakaian hasilnya. Perhatian penelitian kualitatif lebih tertuju pada elemen manusia, objek, dan institusi, serta hubungan atau interaksi di antara elemen-elemen tersebut, dalam upaya memahami suatu peristiwa, perilaku, atau fenomena (Mohamed, Abdul Majid & Ahmad, 2010).

Sedangkan menurut Ulfatin (2015) menjelaskan, penelitian deskriptif dapat dimaknai bahwa semua jenis penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yakni bertujuan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan mengenai karakteristik dari fenomena yang diteliti. Salah Satu ciri dari metode ini adalah bersifat naratif dan umumnya digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang *what*, *how*, dan *why*.

Dalam hal ini, maksud dari penelitian kualitatif deskriptif adalah mengungkapkan fakta dan kondisi dilapangan secara detail dan terperinci mengenai permasalahan yang hendak diteliti. Oleh karena itu, melalui penelitian kualitatif deskriptif ini persoalan yang diteliti adalah bagaimana Implementasi Program Desa Preneur Dalam Pengembangan Usaha Masyarakat di Kalurahan Wiladeg, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, D.I.Y ?

2) Objek dan Subjek Penelitian

- a) Objek penelitian adalah situasi yang mendeskripsikan suatu keadaan terkait objek yang akan diteliti. Objek dari penelitian ini adalah Implementasi Program Desa Preneur Dalam Pengembangan Usaha Masyarakat.
- b) Subjek penelitian adalah Subjek penelitian adalah narasumber atau informan yang akan memberikan data atau informasi mengenai permasalahan atau objek yang hendak di teliti. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Pemerintah Kalurahan, Para

Pelaku Usaha yang terhimpun dalam Kelompok Desa Preneur

Kalurahan Wiladeg. Adapun subjek penelitian dimaksud antara lain:

Table 1.1 Daftar Informan Penelitian

No	Nama Informan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Jabatan
1	Kaniyo	59 Tahun	L	SI	Lurah
2	Nurtika Fitria Reni	34 Tahun	P	S1	Carik
3	Edy Susilo	47 Tahun	L	SMK	Ulu-ulu
4	Lilik Prasetyo	35 Tahun	L	SMK	Pangripta
5	Suko Rahmadi	44 Tahun	L	SMK	Kamituwa/Pj Danarta
6	Risdiyanto	42 Tahun	L	SMK	Ketua Kelompok Preneur
7	Tyas Nur Meida	30 Tahun	P	SMK	Sekretaris Kelompok Preneur
8	Purwanto	52 Tahun	L	SMP	Anggota Kelompok Preneur
9	Juhari	66 Tahun	L	SD	Warga Masyarakat/Pelaku UMKM

3) Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kalurahan Wiladeg, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

4) Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengungkapkan atau menjangkau berbagai fenomena, informasi atau kondisi di lokasi penelitian peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Sebagai manusia dengan segala ketertarikan terhadap dunia, memungkinkan dirinya untuk melakukan pengkajian realitas sosial dan alam sekitarnya. Manusia membutuhkan dasar pijakan kuat dalam melakukan kajian secara sistematis, dalam menangkap gejala-gejala yang divisualisasikan realitas (Prabandari, 2010). Untuk itu, maka observasi menjadi sebuah hal yang perlu dan menjadi keharusan bagi berkembangnya ilmu pengetahuan (Denzin, dan Lincoln, 2009).

Sementara menurut Supriyati (2011) observasi adalah suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dengan mempunyai sifat dasar naturalistik yang berlangsung dalam konteks natural, pelakunya berpartisipasi secara wajar dalam interaksi. Dalam hal ini tujuan observasi mencari tahu dan mengamati serta mengumpulkan fakta mengenai kejadian atau fenomena yang terjadi di lapangan. dalam konteks ini peneliti telah mencari tahu dan mengumpulkan fakta yang berkaitan dengan Implementasi Program Desa Preneur dalam Pengembangan Usaha Masyarakat di Kalurahan Wiladeg.

Dalam konteks ini, peneliti menemukan suatu fenomena yang berkaitan dengan dinamika pelaksanaan program desa preneur di Kalurahan Wiladeg. Dimana melihat dari implementasi yang tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan *output*/keluaran dari program desa preneur, sehingga berdampak terhadap perputaran ekonomi yang tidak optimal.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara dengan tujuan mengumpulkan data-data berupa informasi. Oleh karena itu, teknik wawancara adalah salah satu cara pengumpulan data, misalnya untuk penelitian tertentu. Menurut P. Joko Subagyo (2011) wawancara adalah suatu aktivitas yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada responden. Wawancara dapat berarti berhadapan langsung antara interview dengan responden dan kegiatan tersebut dilakukan secara lisan.

Dalam hal ini, wawancara merupakan kegiatan mencari informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan akan sesuatu variabel informasi yang hendak diteliti. Dalam penelitian ini peneliti hendak mewawancarai beberapa informan yang berkaitan

dengan bagaimana Implementasi Program Desa Preneur dalam Pengembangan Usaha Masyarakat di Kalurahan Wiladeg.

Dalam hal ini, wawancara adalah kegiatan mencari informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada responden mengenai suatu hal yang hendak diteliti. Dalam penelitian ini, maka peneliti telah mewawancarai beberapa informan perihal beberapa poin pokok yang berkaitan dengan implementasi program desa preneur dalam pengembangan usaha masyarakat di Kalurahan Wiladeg, beberapa poin tersebut antara lain: kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumberdaya implementasi, dan karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.

c. Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto (2014) Metode dokumentasi adalah metode mencari data tentang hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya.

Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen yang menunjang penelitian yaitu, antara lain: Profil Kalurahan Wiladeg, Data Profil UMKM di Kalurahan Wiladeg, Struktur Organisasi Kelompok Desa Preneur Wiladeg, rekaman wawancara maupun catatan hasil penelitian dan serta dokumen lainnya yang dianggap relevan guna kebutuhan penelitian.

5) Teknik Analisis Data

Analisis data menurut John W. Tukey yaitu sebuah prosedur dalam menganalisis data, teknik-teknik untuk menjelaskan hasil dari analisis, serta didukung oleh Proses pengumpulan data agar dapat mempermudah proses analisis menjadi lebih tepat dan akurat. Penulis melakukan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan. Kemudian dianalisis dengan pendekatan model interaktif yang terdiri pengumpulan data, reduksi data, display data, hingga pada penarikan kesimpulan. Rangkaian Proses ini diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses reduksi data bukanlah proses yang sekali jadi, akan tetapi proses yang berulang selama proses penulisan berlangsung. Maka dalam mereduksi data penulis memfokuskan pada bagaimana peningkatan kualitas UMKM dari segi mutu, kualitas dan produktivitas yang terjadi melalui Implementasi Program Desa Preneur dalam Pengembangan Usaha Masyarakat Di Kalurahan Wiladeg. Dalam mereduksi data ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut :

a) Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan suatu teknik yang mengandalkan panca indra manusia. Dengan mengumpulkan data yang diperlukan menggunakan metode wawancara, observasi serta dokumentasi. Hasil

dari pengumpulan data berbentuk deskriptif. Dalam konteks penelitian ini maka data-data yang dimaksud ialah profil kalurahan, arsip-arsip, wawancara, dokumenrasi, dan data-data yang dianggap relevan.

b) Reduksi data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal hal yang pokok, berfokus pada hal-hal yang penting sesuai topik penelitian, mencari suatu tema dan polanya, yang pada akhirnya dapat memberikan suatu gambaran yang lebih jelas dan lebih mudah dalam proses pengumpulan data selanjutnya. (Sugiyono, 2018:247-249). Setelah melakukan proses pengumpulan data, peneliti dapat merangkum data data yang telah diperoleh untuk dapat memudahkan peneliti dalam proses selanjutnya. Pada konteks ini, peneliti mereduksi data yang di dapat melalui fokus penelitian yang sudah peneliti susun sebelumnya

c) Display data

Display data atau penyajian data merupakan tahapan teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan penyusunan data secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga dapat lebih mudah dalam menghasilkan kesimpulan. Penyajian data kualitatif disajikan bisa berbentuk table, grafik, flowchart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut dengan terorganisir dan tertata dengan struktur yang lebih mudah pahami (sugiyono, 2018:249). Maka setelah merangkum data data yang telah diperoleh, peneliti kemudian dapat

memproses data tersebut menjadi table, grafik, flowchart, pictogram, lampiran. agar dapat memudahkan peneliti dalam proses penarikan kesimpulan selanjutnya.

d) Penarikan kesimpulan

Menarik kesimpulan adalah tahap akhir teknik analisis data kualitatif yang dilakukan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dalam penelitian kualitatif adalah bersifat sementara dan berkembang pada saat di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian Kualitatif dapat menghasilkan temuan baru dan belum pernah ada, Temuan dapat berupa gambaran, deskripsi maupun objek yang baru pada saat diteliti (Sugiyono, 2018:252). Setelah melakukan semua proses pengumpulan data dan analisis data, peneliti dapat mampu membuat sebuah kesimpulan terhadap penelitian ini, yang dapat berupa gambar dan tulisan (Deskriptif) .

BAB II

PROFIL KALURAHAN WILADEG KAPANEWON KARANGAMOJO KABUPATEN GUNUNGKIDUL

A. Sejarah Kalurahan Wiladeg

Bagi Sebagian besar masyarakat Wiladeg tidak asing lagi dengan nama Mbah Gembong. Ia diyakini sebagai pendiri desa yang dihormati. Mbah Gembong dikenal pada masa keruntuhan kerajaan Majapahit yang melarikan diri ke wilayah yang kini disebut Gunungkidul, kemudian mendiami sebuah wilayah yang sekarang disebut sebagai Kalurahan Wiladeg.

Berdasarkan cerita yang berkembang, leluhur masyarakat Wiladeg bernama Eyang Kertayuda. Eyang Kertayuda ini memelihara anak harimau yang masih kecil. Hewan tersebut ditolong saat terperosok keparit atau sungai. kemudian hewan tersebut dipelihara, sehingga ia mendapat panggilan Mbah Gembong.

Nama Wiladeg berasal dari nama tumbuhan yang diperkirakan pernah tumbuh besar dan jumlahnya banyak di sini yakni pohon Wilada dari bahasa Kawi berarti Lo Gondang atau Welada (Lo). Perubahan nama dari Wilada atau Welada menjadi Wiladeg karena terjadi akronim dalam bahasa. Diperkirakan usia Kalurahan Wiladeg sama dengan usia candi yang ditemukan di Padukuhan Nglampar. Menurut pendapat dari sesepuh Wiladeg Ki Kartojemiko (Kijo), Wiladeg berasal dari kata Wilah Ngadeg (buluh bambu yang berdiri).

Pada zaman dahulu Ki Kertoyudo dan Ki Rau beserta rombongan sampai di sebuah Kalurahan dan diterima oleh warga dengan baik. 34 Kalurahan tersebut dihuni oleh beberapa warga saja, sebagian besar wilayahnya adalah semak belukar dan hutan belantara. Ki Kertoyudo membangun tempat beribadah di Umbul Banteng serta membersihkan sumber air di tempat tersebut. Semakin lama anak keturunan Ki Kertoyudo dan Ki Rau semakin banyak sehingga kampung tersebut sudah terlalu padat untuk dihuni. Oleh karena itu Ki Rau beserta anak cucunya berupaya mencari wilayah lain untuk membangun pemukiman tepatnya sebelah timur jauh dari perkampungan Ki Kertoyudo. Setelah berjalan beberapa saat, bila hendak berkunjung ke kediaman Ki Kertoyudo, mereka berkata “Ayo neng Wilah Ngadeg sowan Mbah Kertoyudo” lama kelamaan tidak menyebut Wilah Ngadeg tetapi “Ayo neng WILADEG sowan Mbah Kertoyudo”. Kebiasaan ini dikukuhkan ketika kenduri Bresik Kalurahan dengan menyebutkan nama Kalurahan ini menjadi Wiladeg.

B. Kondisi Geografis

Secara geografis Kalurahan Wiladeg terletak di Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul dengan luas wilayah 6, 95 KM². Jarak yang ditempuh untuk sampai di Desa Wiladeg adalah jarak dari pusat 42 pemerintah desa \pm 3 km, untuk jarak dari Ibukota Kabupaten \pm 6 km, dan jarak dari Ibukota Provinsi \pm 45 km, dari pusat pemerintahan \pm 470 km.

Kalurahan Wiladeg terdiri dari 10 padukuhan yaitu, Padukuhan Wiladeg, Padukuhan Kerdon, Padukuhan Kendalrejo, Padukuhan Krambilduwur, Padukuhan Karangnongko, Padukuhan Tompak, Padukuhan Ngricik, Padukuhan Kayuwalang, Padukuhan Nglampar dan padukuhan Kenteng.

Kalurahan Wiladeg berbatasan langsung dengan Kalurahan Kelor dan Ngawis di sebelah Timur, sebelah selatan berbatasan dengan Kalurahan Semanuk, di sebelah barat berbatasan dengan Kalurahan Bendungan dan di sebelah Utara berbatasan dengan Kalurahan Bejiharjo.

C. Kondisi Demografi

a) Jumlah Penduduk

Di Kalurahan Wiladeg memiliki jumlah penduduk 4.531 jiwa dan 1.734 Kepala keluarga dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2.230 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 2.301 jiwa. Persebaran penduduk disetiap padukuhan dapat dilihat pada table dibawah ini:

Table 2.1 Jumlah Penduduk Kalurahan Wiladeg

No	Nama Padukuhan	Jenis Kelamin		Jumlah Jiwa	Jumlah KK
		L	P		
1	Krambilduwur	244	275	519	208
2	Kendalrejo	185	194	379	157

No	Nama	Jenis Kelamin		Jumlah	Jumlah
3	Kerdon	122	124	246	104
4	Karangnongko	323	329	652	241
5	Ngricik	337	341	678	241
6	Tompak	299	298	597	202
7	Kayuwalang	228	235	463	190
8	Wiladeg	135	138	273	103
9	Kenteng	183	194	377	149
10	Nglampar	174	173	347	139
Jumlah		2.230	2.301	4.531	1.734

Sumber : *Profil Kalurahan Wiladeg Tahun 2024*

Padukuhan Ngricik memiliki jumlah penduduk paling banyak yaitu sejumlah 678 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit adalah padukuhan Kerdon yaitu sejumlah 246 jiwa.

b) Mata Pencaharian Masyarakat

Mata pencaharian penduduk menjadi pilar utama dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat Wiladeg memiliki macam mata pencaharian. Akan tetapi, mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani. Dilain sisi Sebagian masyarakat juga ada yang berprofesi sebagai aparat sipil negara, wiraswasta, peternak, pengrajin kecil dan buruh bangunan. Keberagaman mata pencaharian tersebut tentu tidak menjadikan masyarakat Wiladeg hidup terpisah-pisahkan akan tetapi menjadikan 44 masyarakat yang utuh dan tetap mengutamakan kebersamaan didalam

kehidupan sosialnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam table dibawah ini:

Table 2.2 Mata Pencapaian Masyarakat Wiladeg

No	Mata Pencapaian	Jumlah Jiwa
1	Aparat Sipil Negara	114
2	Karyawan	111
3	TNI/POLRI	10
4	Swasta	499
5	Wiraswasta/pedagang	178
6	Petani	2393
7	Tukang	243
8	Buruh Tani	69
9	Pensiunan	74
10	Nelayan	19
11	Peternak	218
12	Jasa	138
13	Pekerja Seni	48
14	Pengrajin	58
Jumlah		4.144

Sumber: Profil Kalurahan Tahun 2024

Dari data yang didapati oleh peneliti, ada 387 individu warga kalurahan yang berstatus sebagai pengangguran, artinya bahwa tingkat pengangguran di wiladeg masih banyak. Maka dari itu dalam hal ini pemerintah harus dapat menjawab persoalan ini dengan memberdayakan potensi lokal sebagai potensi ekonomi dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan. Sehingga masyarakat pedesaan tidak perlu ke kota atau merantau guna mencukupi hidupnya. Berkaitan dengan data mata pencapaian masyarakat, peneliti juga turut

melampirkan data individu/keluarga penerima manfaat berupa BLT, sebagai berikut:

Table 2.3 Data Penerima Manfaat BLT Kalurahan Wiladeg 2024

No.	Nama	Padukuhan	Jenis Kelamin	Jenis Pekerjaan
1.	Yutinem	Krambil duwur, 003/001	P	2
2.	Warsiyem	Krambil duwur, 004/001	P	2
3	Widiantoro	Krambil duwur, 003/001	L	99
4.	Rebi	Kendalrejo, 002/002	P	2
5.	Suparmi	Kendalrejo, 004/002	P	99
6.	Waginem	Kerdon, 001/003	P	2
7.	Andang K	Karangnongko, 002/004	L	99
8.	Ngatmi	Karangnongko, 002/004	P	2
9.	Karto Ikromo	Karangnongko, 005/004	L	2
10.	Rusmaji	Karangnongko, 006/004	L	14
11.	Gino Siswoyo	Ngricik, 004/005	L	2
12.	Sumadiyanto	Ngricik, 003/005	L	2
13.	Sumbuk	Ngricik, 001/005	P	2
14.	Saniyah	Ngricik, 004/005	P	2
15.	Maryadi	Tompak, 003/006	L	14
16.	Agus Haryanto	Tompak, 001/006	L	99
17.	Trio Edi W.	Tompak, 002/006	L	99
18.	Ari Marsunu	Tompak, 004/006	L	99
19.	Sukirno	Kayuwalang, 003/007	L	2
20.	Sri Suhartini	Kayuwalang, 001/007	P	99
21.	Minarto	Kayuwalang, 004/007	L	2
22.	Rubiyanti	Wiladeg, 001/008	P	99
23.	Sis Murjono	Wiladeg, 004/008	P	99
24.	Suharyanto	Kenteng, 004/009	L	99
25.	Tri Sumarwati	Kenteng, 003/009	P	99

26.	Sareh Winarto	Nglampar, 002/010	L	2
27.	Marsiyem	Nglampar, 002/010	P	2

Keterangan:

Jenis Pekerjaan 1 = petani pemilik lahan, 2 = petani penggarap/penyewa, 3 = buruh tani, 4 = nelayan pemilik perahu, 5 = nelayan penyewa perahu, 6 = buruh nelayan, 7 = buruh pabrik, 8 = guru sekolah umum, 9 = guru agama, 10 = pedagang barang, 11 = pedagang makanan, 12 = PRT (Pembantu Rumah Tangga), 13 = Pemulung, 14 = Buruh Bangunan, 99 = lainnya

Data pada table diatas, merupakan data yang menggambarkan bahwa di Kalurahan Wiladeg masih terdapat masyarakat dengan kategori miskin, hal itu terlihat dalam jumlah penerima manfaat bantuan sosial berupa BLT (Bantuan Langsung Tunai). Meskipun tidak banyak, namun hal ini dapat dimaknai sebagai alarm bahwa proses peningkatan kualitas hidup harus digalakan melalui program/kebijakan yang ada.

c) Tingkat Pendidikan Masyarakat

Pendidikan merupakan kunci untuk membuka pintu kesempatan dan mendorong kemajuan individu, masyarakat dan bangsa. Tidak heran jika tingkat kemajuan suatu daerah seringkali diukur dari tingkat kemajuan Pendidikan dan partisipasi masyarakatnya dalam dunia Pendidikan. Tingkat Pendidikan yang tinggi membawa banyak manfaat bagi suatu daerah mulai dari peningkatan kualitas hidup hidup sampai pada kemajuan ekonomi. Angka partisipasi Pendidikan di Kalurahan Wiladeg terbilang cukup

tinggi Mulai dari TK sampai pascasarjana. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 2.4 Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah Jiwa
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Belum Tamat SD/Sederajat	204	198	402
2	Tamat SD/Sederajat	317	371	688
3	SMP/Sederajat	410	429	839
4	SMA/Sederajat	683	557	1241
5	Diploma I/II	10	15	25
6	Akademi/D3/S.Mud	39	41	80
7	Diploma IV/Strata I	106	98	203
8	Strata II	6	3	9
9	Strata III	0	0	0
Total		1.775	1.712	3.487

Sumber Profil Kalurahan Tahun 2024

Dari data di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa angka partisipasi Pendidikan masyarakat di Kalurahan Wiladeg yang melanjutkan pendidikan setelah lulus SMA/ sederajat yaitu 309 Jiwa mulai dari Diploma I sampai dengan Diploma IV/Strara I. Sedangkan yang tidak berpendidikan 1014 Jiwa. Melihat dari data di atas maka, harus dapat memastikan masyarakat yang tidak melanjutkan pendidikan apalagi yang tidak bersekolah harus mendapat jaminan akan kesejahteraan, paling tidak dengan berbagai program yang ada di kalurahan dapat berdampak kepada seluruh masyarakat. Kemudian pemerintah Kalurahan Wiladeg juga membangun inprastruktur penunjang Pendidikan untuk meningkatkan Pendidikan masyarakat.

Hal tersebut terlihat dari berdirinya beberapa fasilitas Gedung seperti Gedung belajar Pendidikan anak usia dini (PAUD), taman kanak-kanak (TK), dan sekolah dasar (SD) kemudian untuk melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi SMP, SMA maupun perguruan tinggi masyarakat harus keluar Wiladeg seperti ke Kapanewon, Kabupaten Bahkan hingga ke provinsi.

d) Kepercayaan Masyarakat

Agama dan kepercayaan masyarakat merupakan cermin dari kebutuhan spiritual dan pencarian makna manusia. Agama dan kepercayaan memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk identitas individu, mengarahkan tindakan moral serta memainkan peran dalam membentuk masyarakat yang beradab. Masyarakat Wiladeg memeluk agama yang cukup majemuk, ketika berbicara kemajemukan tentu kerukunan antar umat beragama merupakan suatu hal yang paling dasar dan sangat berpengaruh bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat yang tentram dan damai. Untuk komposisi penduduk menurut agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Wiladeg dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Table 2.5 Kepercayaan Masyarakat Wiladeg

No	Kelompok	Jenis Kelamin		Jumlah Jiwa
		Laki-laki	Perempuan	
1	Islam	1740	1591	3331

No	Kelompok	Jenis Kelamin		Jumlah
2	Kristen	505	551	1056
3	Katholik	84	59	143
4	Hindu	0	0	0
5	Budha	0	0	0
6	Khonghucu	0	0	0
7	Kepercayaan Lainnya	1	0	1
Total		2330	2201	4.531

Sumber Profil Kalurahan Tahun 2024

Dari tabel di atas diketahui bahwa mayoritas masyarakat di Kalurahan Wiladeg memeluk agama Islam dengan Jumlah 3331 jiwa. meskipun demikian, hal tersebut tidak menjadikan masyarakat 47 Wiladeg sektarian dan terkotak-kotakan. Akan tetapi dengan keberagam agama dan kepercayaan menjadikan masyarakat Wiladeg dalam satu kesatuan yang utuh dan saling menjaga dan toleran antar umat beragama.

e) Adat Istiadat Masyarakat

Adat merupakan bagian integral yang tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan masyarakat. Adat istiadat memiliki peran penting dalam menjaga harmoni, memperkuat ikatan sosial dan menjalankan fungsi-fungsi sosial. Masyarakat Kalurahan Wiladeg memiliki adat istiadat yang masih dilestarikan sampai dengan sekarang.

Bersih desa atau biasa dikenal dengan Rasulan merupakan adat istiadat istiadat yang sudah ada sejak masa lampau dan masih dijaga masyarakat sampai dengan sekarang. Adat ini merupakan ungkapan

syukur masyarakat Wiladeg atas Rahmat dan nikmat Tuhan YME yang dinikmati sampai sekarang baik berupa hasil panen yang melimpah, hasil bekerja dan rejeki-rejeki lainnya yang diterima. Kemudian kegembiraan masyarakat itu diekspresikan dengan mengadakan pesta rakyat yang menghadirkan tontonantontonan seni rakyat seperti Reog, Jhatil dan seni rakyat lainnya. Kemudian dalam upacara ini masyarakat akan bergotong royong dalam memikul beban seperti bahan makan, menyampingkan segala perbedaan yang ada dan Bersatu sebagai masyarakat Wiladeg yang harmonis dan utuh.

D. Struktur Pemerintah Kalurahan

Struktur Pemerintah Kalurahan Wiladeg dapat dilihat pada bagan sebagai berikut: **Gambar 2.1 Bagan Struktur Pemerintah Kalurahan**



Sumber: Profil Kalurahan Wiladeg 2024

Table 2.6 Data Personal Pemerintah Kalurahan

No	Nama	Jenis Kelmain	Usia	Pendidikan	Jabatan
1	Kaniyo	L	58	S1	Lurah
2	Nurtika Fitria Reni	P	33	S1	Carik
3	Andang Jarot Trigunawan	L	60	SPG	Kaur Danarta
4	Sisnanto	L	49	SLTP	Kaur Tata Laksana dan Umum
5	Lilik Prasetyo	L	38	SMK	Kaur Pangripta
6	Suko Rahmadi	L	44	SMK	Kamituwa
7	Tony Andiyanto	L	38	SMK	Jagabaya
8	Edy Susilo	L	46	SMK	Ulu-Ulu
9	Sumarno	L	58	SLTA	Dukuh Krambilduwur
10	Alvian Novi Handana	L	35	D3	Dukuh Kendalrejo
11	Alfian Widi Jaya	L	46	SLTA	Dukuh Kerdon
12	Zumrotus Solihah	P	32	S1	Dukuh Karangnongko
13	Yosi Haryanto	L	35	SMA	Dukuh Ngricik
14	Supriyadi	L	38	SLTA	Dukuh Tompak
15	Monika Murbo Astuti	P	45	S1	Dukuh Kayuwulang
16	Ragil Krisnani	P	44	S1	Dukuh Wiladeg
17	Rudi Setyawan	L	48	STM	Dukuh Kenteng
18	Dwi Hartono	L	49	SLTP	Dukuh Nglampar
19	Sumarwati	P	48	S1	Staf Pamong
20	Otniel Apta Danu Kusumo	L	35	SMA	Staf Pamong
21	Yohana Lipur Nugraheni	P	40	SMA	Staf Pamong

Sumber: Profil Kalurahan Wiladeg 2024

Dari data yang ada di atas, berkaitan dengan data personal daripada pamong ataupun perangkat Kalurahan Wiladeg – memperlihatkan bahwa memang perangkat kalurahan didominasi oleh laki-laki. Namun,tidak berarti pada

prosesnya perempuan tidak dilibatkan – pada posisi-posisi strategis perempuan menempati posisi strategis di struktur yang ada, misalnya pada carik/sekretaris desa yang saat ini di ampuh oleh Nurtika Fitria Reni. Pada konteks tingkat pendidikannya pun beragam, mulai dari SMA/ sederajat, D3 dan Strata 1/ S1

E. Struktur Kelompok Desa Preneur

Ada pun susunan pengurus dari kelompok desa preneur, sesuai keputusan Lurah Wiladeg Nomor. 25a Tahun 2022 Tentang Penunjukan Kepengurusan Desa Preneur Kaurahan Wiladeg Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul Periode 2022-2025, sebagai berikut:

Table 2.7 Struktur Kepengurusan Kelompok Preneur Wiladeg

No.	Jabatan	Nama	Unsur
1.	Pelindung	Kaniyo	Lurah
2.	Pembina	Puji rahayu Edy susilo Suko rahmadi	Ketua TP PKK Ulu-Ulu Kamituwa
3.	Ketua	1. ananto sumardani 2. risdiyanto	
4.	Sekretaris	1. Tyas Nur Meida 2. wahyu puji lestari	
5.	Bendahara	1. eka dwi lestari 2. sri mujiati	
Bidang			
A. Bidang Produksi		1. Pamiyati 2. Annie Martha Rosang 3. Sri Supadmi	

No.	Jabatan	Nama	Unsur
	B. Bidang Promosi, Pemasaran, dan Penjualan	1. Pangestu 2. haryati 3. Sumiyarsih	
	C. Bidang Sumber daya Manusia (SDM)	1. Maya Rolina - Dukuh Krambildulur - Dukuh Kendalrejo - Dukuh Kerdon - Dukuh Karangnongko - Dukuh Ngricik - Dukuh Tompak - Dukuh Kayuwalang - Dukuh Wiladeg - Dukuh Kenteng - Dukuh Nglampar	
	D. Bidang Digital Marketing	1. Yokhebed Sapta Putri 2. Umi Nurjanatik	
	E. Bidang Kelembagaan	1. Sulasmi 2. Ani Rohasih	
	F. Bidang Keuangan	1. Sumarwati 2. Ngadinah	

Sumber: Profil Kalurahan Wiladeg 2024

Dari data yang dipaparkan, dapat dilihat bahwa kepengurusan yang sudah dibentuk berisikan perangkat kalurahan, hal ini tentu akan lebih mudah dalam membangun komunikasi maupun koordinasi soal hambatan dan peluang yang ada. Tidak hanya dalam komunikasi pembagian bidang yang dilakukan juga dapat memaksimalkan proses manajemen dari pada pengembangan program desa preneur yang ada

di Kalurahan Wiladeg. Namun, pada pelaksanaan kepengurusan yang dibentuk tidak berjalan secara maksimal – dari hasil pengamatan dan temuan peneliti – banyak anggota yang mundur atau memilih pasif dalam kelompok yang sudah dibentuk. Lebih lanjut, berkenaan dengan dinamika kelompok desa preneur belum memiliki satu program kerja yang menjadi acuan dalam menjalankan aktivitas kerja kelompok yang membuat pembuatan struktur dan bidang-bidang berjalan ditempat. Selanjutnya, terkait data pelaku usaha yang terhimpun dan juga tergabung dalam pelaksanaan program juga dipaparkan lebih detail lengkap dengan jenis usahanya masing-masing, sebagai berikut:

Table 2.8 Data Pelaku Usaha Kelompok Preneur Wiladeg

No.	Nama	Jenis Usaha
1.	Risdiyanto	Aksesoris Dekorasi
2.	Tyas Nur Meida	Aneka Snack & Bakery
3.	Eka Dwi Lestari	Susu Kedelai
4.	Edy susilo	Drumband
5.	Marwati	Klontong
6.	Maya	Bubur & Sewa Dekorasi Pesta
7.	Sulasmi	Rempeyek
8.	Srisupatmi	Snack, Catering & Stick Aloe vera

No.	Nama	Jenis Usaha
9.	Ade Martanti	Telur Bebek
10.	Yanti	Sego Berkat
11.	Puji	Angkringan
12.	Sri Mujiyati	Snack/Catering & Rengginan
13.	Ngadinah	Tempe Godong Jati
14.	Pamiyati	Kacang Telur
15.	Umi	Snack & Catering
16.	Purwanto	Pengerajin Wayang & Ukir
17.	Tutik	Kripik Pisang & Telo
18.	Moko	Lukisan & Ukir Kayu
19.	Asih	Aneka Jus Buah
20.	Ani MR	Snack
21.	Rini	Aneka Olahan Krupuk & Krecek
22.	Ani Rohasih	Aneka Olahan Krupuk & Krecek

Sumber: Profil Kalurahan Wiladeg 2024

Data yang dipaparkan di atas memperlihatkan bahwa, jenis usaha dominan yang ada dalam kelompok usaha desa preneur ialah usaha makanan, minuman, dan aneka jenis makanan ringan – jenis usaha lainnya kerajinan. Disisi lain juga, mayoritas anggota kelompok desa preneur

wiladeg merupakan ibu-ibu. Dengan demikian, maka hambatan dalam menyelaraskan strategi pengembangan pun harus berbeda, yang mana kebutuhan dan juga strategi pengembangan antar dua jenis usaha yang ada itu berbeda. Banyak dari pelaku usaha yang bergerak disektor kerajinan lebih mudah dalam menjalankan aktivitas penjualan berbasis pada platform digital, sementara pada sektor usaha jenis makanan dan sejenisnya masih belum mampu memanfaatkan digital marketing dikarenakan keterbatasan kompetensi dan juga hambatan dalam hal packing/pengemasan.

F. Visi dan Misi Kalurahan Wiladeg

a) Visi

Visi Kalurahan Wiladeg disusun berdasarkan pada sumber utama dari visi Lurah terpilih melalui proses pemilihan Lurah secara langsung. Visi dan Misi RPJMKal ini ditetapkan untuk tahun 2019- 2025 yang dilakukan dengan pendekatan partisipatif dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Kalurahan Wiladeg seperti Pemerintah Kalurahan, Bamuskal, tokoh masyarakat, tokoh 35 agama, Lembaga kemasyarakatan Kalurahan, dan masyarakat Kalurahan pada umumnya. Visi Kalurahan Wiladeg adalah: “Mewujudkan Pemerintah Kalurahan Wiladeg yang Bersih, Masyarakat yang Mandiri, dan Pembangunan yang Berkelanjutan”.

b) Misi

Untuk meraih Visi Kalurahan seperti yang dijabarkan di atas, maka disusunlah Misi Kalurahan Wiladeg Tahun 2019 – 2025 sebagai berikut:

- Mewujudkan pemerintahan kalurahan yang jujur, transparan, akuntabel, dan mengedepankan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan.
- Mendorong pemberdayaan potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat mandiri dan tangguh berswadaya.
- Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya kalurahan, peran BUMKal, dan memberdayakan potensi PAKal.
- Melaksanakan pembangunan di segala bidang yang merata, proporsional, berkualitas, dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

G. Strategi kebijakan

1. Strategi Internal

- Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah kalurahan agar dapat memahami dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

- Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dalam penyelenggaraan pemerintah kalurahan dan pelaksanaan kegiatan lembaga-lembaga kalurahan.
- Pengelolaan keuangan kalurahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Meningkatkan keterbukaan penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan.
- Peningkatan sumber daya masyarakat agar masyarakat menjadi lebih produktif dan mampu berdaya saing menghadapi perkembangan lingkungan.
- Menggali potensi di wilayah kalurahan guna menambah PAKal untuk menambah dana stimulan pemerintah dalam pembangunan yang ada di Kalurahan.
- Meningkatkan SDM masyarakat dengan mengadakan pelatihan-pelatihan khususnya di bidang pertanian dan Usaha Kecil Menengah (UKM) serta industri rumah tangga untuk mendorong tingkat perekonomian masyarakat.
- Mendorong peningkatan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan.
- Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat kalurahan dalam hal pembangunan infrastruktur penunjang peningkatan perekonomian

masyarakat kalurahan, sarana pendidikan, kesehatan, transportasi, penerangan, dan komunikasi.

- Meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat dan Lembaga kalurahan dalam perencanaan pembangunan partisipatif, pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan, serta evaluasi kegiatan pembangunan dan kegiatan lain yang dilaksanakan di Kalurahan Wiladeg.
- Menciptakan pola hubungan kemitraan yang baik antara Pemerintah Kalurahan dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) dan lembaga-lembaga kemasyarakatan Kalurahan.

2. Strategi Eksternal

- Membangun kemitraan yang baik dengan Pemerintah di atasnya dan pihak ketiga dalam mewujudkan capaian program.
- Melakukan pengawalan terhadap kebijakan pembangunan kalurahan yang dituangkan dalam RPJMKal pada forum Musrenbang Kapanewon maupun Kabupaten dan forumforum OPD.
- Penataan manajemen perencanaan pembangunan melalui pemilihan target pembangunan supra kalurahan dan infrakalurahan sehingga pembangunan dapat berjalan sesuai kewenangan kalurahan dan pemerintah di atasnya.

3. Arah Kebijakan Pembangunan Kalurahan

Kebijakan Pembangunan ini diarahkan dalam kebijakan sebagai berikut:

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan

- Memfasilitasi peningkatan rutinitas Pemerintah Kalurahan dan kesejahteraan Pamong Kalurahan.
- Memfasilitasi peningkatan rutinitas Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) dan lembaga lainnya tingkat Kalurahan.
- Penyediaan peralatan kerja dan sarana prasarana untuk mendukung pelaksanaan tupoksi Pemerintah Kalurahan, Bamuskal, dan lembaga Kalurahan.
- Menyusun kebijakan Kalurahan untuk meningkatkan pengelolaan sumber-sumber PAKal dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki Kalurahan. Perbaikan pengelolaan arsip Kalurahan. Menyediakan informasi pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan secara terbuka dan dapat dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

- Melaksanakan intensifikasi PBB untuk menggugah kesadaran masyarakat taat bayar pajak sehingga capaian pembayaran PBB sesuai dengan target yang ditentukan.
- Pengadaan tanah milik kalurahan serta mengurus kelengkapan administrasi tanah kas kalurahan dan tanah milik kalurahan.

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan

- Memfasilitasi pelayanan pendidikan bagi anak usia dini lewat PAUD.
- Meningkatkan taraf kesehatan masyarakat dan penanggulangan stunting pada balita dengan pelaksanaan posyandu, pembangunan jamban sehat, stimulan pembangunan RTLH, pembangunan SPAL, dan penyuluhan kesehatan bagi masyarakat.
- Membangun infrastruktur penunjang peningkatan perekonomian masyarakat kalurahan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat kalurahan seperti pembangunan/ rehabilitasi jalan, pembangunan sarana prasarana jalan (talud, gorong-gorong, drainase, dan penerangan jalan), pembangunan jalan usaha tani, pembangunan jembatan, dan lain-lain.

- Mengembangkan wajah kalurahan dengan membangun infrastruktur seperti taman kalurahan, pemeliharaan 40 lapangan olahraga, pengembangan kawasan Kali Banteng, pemanfaatan bangunan calon makam yang tidak terpakai, pemeliharaan/ rehabilitasi balai budaya, serta pembangunan gapura kalurahan dan gapura masuk padukuhan.
- Menyediakan air bersih bagi masyarakat kalurahan dengan pembangunan dan pengelolaan PAMDes.

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan

- Mengembangkan kelompok seni dengan memberikan pelatihan dan bantuan prasarana kesenian (kostum dan peralatan).
- Menjaga budaya dan tradisi masyarakat kalurahan agar tetap lestari dengan memfasilitasi pelaksanaan eveneven budaya dan memberikan dukungan bagi Lembaga Kalurahan Budaya.
- Peningkatan SDM dan sarana prasarana lembaga kemasyarakatan kalurahan.
- Peningkatan SDM dan sarana prasarana linmas dan jaga warga dalam menciptakan lingkungan yang aman, tenteram, dan kondusif.

- Membangun komunikasi aktif dengan pengurus Lembaga kemasyarakatan kalurahan untuk mendorong peran aktif LKKal sebagai mitra Pemerintah Kalurahan.
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan
- Menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana pertanian serta pengolahan hasil pertanian dan memberikan pelatihan pengolahan hasil pertanian untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
 - Memfasilitasi kegiatan Gapoktan sebagai wadah kegiatan dan aspirasi para petani.
 - Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi tepat guna di Kalurahan (dari sektor pertanian, peternakan, dan perikanan).
 - Memberikan dukungan bagi pengembangan BUMKal
 - Memfasilitasi kelompok ekonomi produktif dengan menyelenggarakan pelatihan keterampilan yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif, bantuan peralatan, maupun bantuan akses permodalan.
 - Peningkatan SDM Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal.

Berdasarkan uraian di atas, pemerintah kalurahan membuat berbagai bentuk kebijakan dan pembangunan yang menerjemahkan Visi Misi, Strategi Kebijakan Secara Internal, Eksternal. Salah satu bentuknya ialah berkaitan dengan Misi Kalurahan Wiladeg, sebagai berikut: Mendorong pemberdayaan potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat mandiri dan tangguh berswadaya. Yang diterjemahkan dengan memfasilitasi pelaku usaha yang ada di Kalurahan Wiladeg dalam pendampingan dan juga pelatihan yang berbasiskan pada Program desa preneur. Program desa preneur merupakan satu dari empat pilar dalam menciptakan Desa Mandiri Budaya sesuai dengan Pergub D.I.Y No. 93 Tahun 2020 Tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya yang mengupayakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa melalui pengembangan dinamika entrepreneurship dan membantu pengentasan kemiskinan serta mengurangi pengangguran, melalui pengembangan kapasitas masyarakat secara berkelanjutan. Dan untuk itu, peneliti juga menguraikan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Wiladeg Tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 2.9 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Wiladeg 2024

Kode Rekening		Uraian	Anggaran
1	2	3	4

Kode Rekening		Uraian	Anggaran
<u>1</u>	4	PENDAPATAN	
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	111.284.000,00
	4.2.	Pendapatan Transfer Pendapatan Lain-lain	2.487.022.700,00
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	21.690.000,00
	5.	JUMLAH PENDAPATAN	2.619.996.700,00
		BELANJA	
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.193.858.717,00
<u>2</u>		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	833.683.750,00
<u>3</u>		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	215.729.400,00
<u>4</u>		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	291.253.450,00
<u>5</u>		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK	104.200.000,00
		JUMLAH BELANJA	2.638.725.317,00
		SURPLUS/(DEFISIT)	(18.728.617,00)
	6	PEMBIAYAAN	
		Penerimaan Pembiayaan	243.728.617,00
		Pengeluaran Pembiayaan	225.000.000,00
		PEMBIAYAAN NETTC	18.728.617,00

Sumber: Profil Kalurahan 2024

Table di atas, merupakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Wiladeg Tahun 2024 yang menjadi pedoman penyelenggaraan tata pemerintahan Kalurahan Wiladeg. Sebagaimana uraian di atas, memperlihatkan Belanja pada Bidang Penyelenggaraan menjadi bidang dengan anggaran terbesar, kemudian bidang dengan anggaran paling minim adalah Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan

juga Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Lebih lanjut, pada konteks implementasi program desa preneur komitmen pemerintah dalam mendukung program tersebut tertuang dalam Rancangan APBKal Tahun 2024 dalam Sub. Bidang Koperasi, Usaha Kecil Mikro dan Menengah, yang mana dalam mengakomodir kepentingan para pelaku usaha – pemerintah mengupayakan Pengadaan Tenda Penjualan yang diperuntukan bagi para pelaku usaha di Kalurahan Wiladeg – berkaitan dengan pengadaan sarana maupun prasarana oleh pemerintah merupakan wujud komitmen pemerintah sekaligus moral sebagai pihak yang memiliki otoritas atas penyelenggaraan program desa preneur di Kalurahan Wiladeg.

Dari rancangan APBKal yang uraikan oleh peneliti terkait pengadaan tenda penjualan untuk pelaku usaha yang terhimpun dalam kelompok usaha desa preneur wiladeg – peneliti menyimpulkan bahwa pada pelaksanaan program desa preneur – pemerintah kalurahan dalam upaya mengoptimalisasi program desa preneur memfasilitasi kaitan dengan pengadaan anggaran guna pertemuan dan juga pelatihan rutin, sampai pada pengadaan tenda yang diadakan pada rancangan APBKal kelurahan wiladeg. Namun, dari hemat peneliti melihat kebutuhan substansial dari pelaksanaan program desa preneur terletak pada rumah produksi/alat produksi guna mendorong produktivitas dan juga peningkatan kualitas dari pada jenis barang yang di pasarkan – tidak hanya itu, keterampilan dalam menggunakan teknologi juga menjadi prioritas, banyak dari pada pelaku usaha masih cenderung kurang menguasai keterampilan dalam menggunakan

teknologi yang ada, sehingga menjadi hambatan dalam jangkauan promosi dan pemasaran.

BAB III

ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM DESA PRENEUR DALAM PENGEMBANGAN USAHA MASYARAKAT DI KALURAHAN WILADEG

A. Kondisi Lingkungan Tempat Pelaksanaan Program Desa Preneur

Kondisi lingkungan tempat pelaksanaan satu program/kebijakan merupakan satu faktor penting dalam melihat bagaimana kondisi sosial, politik, dan ekonomi masyarakat sebagai salah-satu faktor yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan yang ada. sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan. Dalam masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi yang lebih maju atau dengan kata lain dengan SDM yang terbuka dan terdidik tentu relatif mudah menerima program-program pembaruan yang diimplementasikan dibanding dengan masyarakat yang tertutup dan masih tradisional. Disisi lain juga ketepatan dari sebuah program/kebijakan tempat pelaksanaan juga perlu memerhatikan dengan kondisi sosial, ekonomi masyarakat yang ada, sehingga implementasi dari sebuah program dapat berdampak dengan maksimal. Hal ini tentu berkenaan dengan bagaimana implementasi program desa preneur di Kalurahan Wiladeg, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul. Maka berkaitan dengan hal tersebut, disinggung oleh Kaniyo selaku Lurah Kalurahan Wiladeg, yakni sebagai berikut:

“terkait dengan preneur (program desa preneur) alhamdulillah selama ini dari segi apapun tidak ada benturan – saya anggap bisa berjalan dengan baik, ini kan memang wiladeg (Kalurahan Wiladeg) sudah sudah masuk

rintisan mandiri budaya sehingga ada empat aspek yang alhamdulillah dipenuhi. Dari budaya, wisata, kemudian preneur dan prima”. (Wawancara 10 Juni 2024)

Dari apa yang disampaikan Lurah di atas, peneliti menyimpulkan bahwa dalam implementasi program desa preneur yang ada di Kalurahan Wiladeg memang tidak mendapat resistensi atau dengan kata lain mendapat respon yang baik dalam pelaksanaannya, ini terjadi karena Kalurahan Wiladeg secara tidak langsung memang sudah memulai program rintisan mandiri budaya sehingga masyarakat sudah dibekali dengan pengetahuan yang cukup akan program desa preneur yang merupakan satu pilar penting dalam mewujudkan desa mandiri budaya. hal ini tentu menunjukkan bahwa masyarakat/para pelaku usaha cukup terbuka dan terdidik dalam menerima program-program pembaruan yang ada. Hal yang sama juga disampaikan oleh Risdiyanto selaku ketua dari pada kelompok desa preneur di Kalurahan Wiladeg, sebagai berikut:

“untuk program desa preneur menurut saya juga bagus untuk kelanjutan para pelaku usaha UMKM, karena kalau di desa seperti kita ini tidak bisa dipungkiri kita dulu minim informasi terkait pemasaran, pengemasan, dan promosi. Setelah ada desa preneur ini kita (para pelaku usaha) dikasih pelatihan tentang itu (pemasaran,pengemasan,promosi)”. (Wawancara 11 Juni 2024)

Pernyataan di atas, telah mengafirmasi pernyataan sebelumnya bahwa program desa preneur memang mendapat respon baik dari pelaku usaha yang ada, karena dalam implementasi program desa preneur banyak memberikan program pelatihan yang meningkatkan pemahaman pelaku usaha akan instrumen penting sebagai upaya dalam pengembangan usaha yang ada di Kalurahan Wiladeg.

Disisi lain, berkaitan dengan antusiasme masyarakat ataupun para pelaku UMKM yang ada di Kalurahan Wiladeg tentu juga harus memerhatikan akan potensi yang ada. Hal ini tentu saja menjadi faktor penting dalam hal memobilisasi sekaligus mengoptimalisasi berbagai jenis usaha yang ada di Kalurahan Wiladeg. Maka bersinggungan dengan hal tersebut, juga di terangkan oleh Lilik Prasetyo selaku Pangripta di Kalurahan Wiladeg:

“banyak sebenarnya kalau yang bisa dikatakan sebagai potensi – kita kan di Kalurahan Wiladeg sendiri karena dilewati jalan provinsi dan akses wisata ke Umbul banteng maupun akses Goa Pindul karena melewati wiladeg – jadi untuk desa preneur sendiri sangat berpeluang (potensi pengembangan usaha)”. (Wawancara 10 Juni 2024)

Dari yang disampaikan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa sasaran implementasi program desa preneur bisa dikatakan tepat sasaran yang memang sinergis dengan potensi yang ada. Kalurahan yang menjadi akses wisata diantaranya Goa Pindul dan Umbul Banteng berkesempatan menjadi area lalu lalang para wisatawan yang hendak berwisata – maka dengan demikian lingkungan ekonomi yang demikian dapat diidentifikasi sehingga dapat menjemput modal dan ruang yang ada. Seperti daerah lainnya di kota yogyakarta yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai pendobrak pengembangan ekonomi masyarakat. hendaknya dengan potensi yang ada di Kalurahan Wiladeg dapat mendongkrak perekonomian yang ada di sekitar area wisata dalam hal ini khususnya para pelaku usaha UMKM.

Akan tetapi, dari hasil penelusuran yang dilakukan – peneliti menemukan dalam kelompok usaha desa preneur yang dibentuk masih belum dapat melibatkan/mengintegrasikan semua pelaku usaha yang ada Kalurahan Wiladeg. Dari temuan yang didapatkan peneliti dari 178 orang yang berprofesi sebagai wiraswasta, hanya 21 orang yang mengisi kelompok dan terlibat aktif pada pendampingan serta pelatihan yang difasilitasi oleh desa preneur. Artinya kurang dari 50% para pelaku usaha masih belum terjaring, padahal dengan hadirnya program desa preneur di proyeksikan guna mendongkrak perekonomian di wilayah pedesaan melalui pendampingan dan juga pelatihan yang ada program desa preneur. Dengan presentase keterlibatan yang ada, tentu ini menjadi evaluasi bagi pemerintahan kalurahan dalam proses mobilisasi yang kurang maksimal. Berkaitan dengan hal tersebut disampaikan oleh Edy Susilo selaku Ulu-Ulu Kalurahan Wiladeg, sebagai berikut:

“memang di desa preneur kita belum bisa merangkul atau belum bisa menjadikan satu kaitan dengan yang punya usaha (para pelaku usaha yang ada). Karena kontribusi kita ke desa preneur masih minim (pencapaian) – sehingga masih banyak dari pelaku usaha masih enggan terlibat”. (wawancara 10 juni 2024)

Dari apa yang disampaikan oleh Edy Susilo, peneliti menyimpulkan bahwa memang secara keanggotaan yang ada di kelompok desa preneur hanya berisikan 22 orang, walaupun secara representatif mewakili beberapa padukuhan yang ada di Kalurahan Wiladeg, namun pada prinsipnya program desa preneur memiliki orientasi yang lebih luas dalam memberdayakan para pelaku usaha, sehingga

partisipasi dari pada pelaku usaha menjadi satu keharusan – karena pembangunan ekonomi di wilayah pedesaan membutuhkan kerja gotong royong dari segenap instrumen dan pihak yang berkepentingan. Hambatan yang ada pun, tidak terlepas dari minimnya partisipasi yang ada. Lebih lanjut, berkaitan bagaimana partisipasi daripada para pelaku usaha, dipaparkan oleh Juhari selaku pelaku usaha UMKM, sebagai berikut:

“Sebenarnya kalau saya belum tahu, soal program itu (program desa preneur). Jadi selama ini juga pengennya ada bantuan, namanya kita rakyat kecil kan butuh perhatian juga dari orang kalurahan (pemerintah), misalnya saya kan bisa bikin tas sama sabuk tapi karna tidak ada modal buat bangun itu, jadi masih jualan kayak gini mas. Jual nasi sama sayur sekalian jajanan ringan”. (wawancara 19 Juli 2024)

Dari pernyataan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa salah satu persoalan dari pada minimnya partisipasi dari para pelaku UMKM, yaitu berkaitan dengan proses sosialisasi yang kurang maksimal sehingga pada perjalanannya subyek utama dari program desa preneur yakni pelaku usaha justru tidak mendapatkan distribusi informasi dari program yang ada. Kemudian, permasalahan berikutnya ialah terkait kendala substansial dari pelaku usaha, banyak dari pelaku usaha yang memiliki keterampilan yang tidak dapat diberdayakan karena terhambat permodalan yang terbatas. Hal ini kemudian yang perlu di selesaikan melalui program/kebijakan yang mengakomodir permasalahan yang ada.

Maka dengan berbagai persoalan yang berkaitan dengan implementasi program desa preneur di Kalurahan Wiladeg perlu menjadi perhatian serius daripada pemerintah dan segenap pihak-pihak yang memiliki otoritas atas implementasi program desa preneur guna mencapai targetan dari program desa preneur dalam mengembangkan usaha masyarakat di Kalurahan Wiladeg. Berkaitan dengan bagaimana partisipasi yang masih lemah perlu disikapi secara serius oleh pemerintah dan juga pihak-pihak yang berkepentingan sehingga segenap masyarakat yang merupakan pelaku usaha dapat diberdayakan dan memiliki dampak dalam pembangunan ekonomi sehingga dapat memajukan kualitas hidup. Tidak hanya itu saja, pengembangan usaha masyarakat juga harus berkesesuaian dengan aspek potensi yang ada di Kalurahan Wiladeg itu sendiri, sehingga peluang pengembangan ekonomi dapat sejalan dengan potensi kalurahan – maka dalam hal ini sinergitas antara pemerintah dan masyarakat sebagai subyek implementasi inilah yang menjadi parameter keberhasilan daripada program itu sendiri.

B. Hubungan Antar Lembaga Dalam Implementasi Program Desa Preneur

Dalam banyak kebijakan, implementasi sebuah program memerlukan dukungan dan koordinasi dan sampai pada kolaborasi. Hal ini menjadi penting mengingat bahwa koordinasi serta kolaborasi dengan lembaga lain dapat menciptakan sinergitas yang kemudian memperkuat efektivitas dan efesiensi dari sebuah kebijakan/program. Hal ini tentu berkaitan juga dengan *goals* dari pada

program . Desa preneur yang mana memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi usaha, peningkatan semangat kewirausahaan dan kualitas SDM para pelaku UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena itu, dengan prioritas pada peningkatan softskill dari para pelaku usaha, program Desa Preneur terwujud dalam bentuk Pendidikan, Pelatihan, Fasilitasi, dan Pendampingan.

Lebih lanjut, dukungan yang dimaksud tidak hanya dari pada masyarakat saja – tetapi juga dari pada kelembagaan yang ada di kalurahan hingga menjalin kerja sama dengan organisasi swasta yang bisa memperluas jaringan dan memperbesar jangkauan hingga sumberdaya yang dapat memaksimalkan tujuan program yang di implementasikan. Walaupun dalam pelaksanaannya program desa preneur ini telah didampingi Dinas Koperasi UKM DIY yang mana sebagai konseptor dari pada program desa preneur. Maka berkaitan dengan hubungan antar lembaga dalam implementasi program desa preneur, disampaikan oleh Lilik Prasetyo selaku Pangripta, sebagai berikut:

“kalo untuk kerja sama, kami baru (baru mengupayakan) – jadi BUM Desa itu baru rintisan (pembangunan kembali). Kita mau mengajukan pemasaran melalui BUMDes. Sementara untuk kerja sama dengan pihak lain (organisasi/lembaga pemerintah maupun swasta) itu belum ada”. (Wawancara 10 Juni 2024)

Dari pernyataan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa dalam implementasi program desa preneur masih mengalami hambatan dalam hal kerja sama kelembagaan yang ada di kalurahan. Sehingga para pelaku usaha yang terhimpun dalam kelompok desa preneur mengalami kondisi stagnansi dalam pengembangan

dan ekspansi usaha. Hal ini tentu berimplikasi terhadap efektivitas jejaring pengembangan usaha dalam rangka memajukan kualitas, mutu dan produktivitas dari pelaku usaha. Padahal dalam kalurahan memiliki satu lembaga yang bernama Badan Usaha Milik Kalurahan yang selanjutnya disingkat BUMKal yang merupakan lembaga yang dibentuk guna memanfaatkan segala potensi perekonomian, sumberdaya alam dan sumberdaya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat kalurahan. Berkaitan dengan apa yang disampaikan di atas oleh Lilik Prasetyo tentang kemitraan lembaga yang sedang diupayakan bersama BUMKal. Hal yang sama juga disampaikan oleh Risdiyanto selaku Ketua Kelompok Desa Preneur, sebagai berikut:

“kita belum ada kerja sama dengan BUM Desa (BUMKal) juga belum ada. Itu masih sebatas wacana – jadi dari pembicaraan dengan pihak kalurahan rencananya nanti kalo BUM Desa sudah berjalan dengan baik – kita akan menitipkan produk-produk dari preneur di BUM Desa”. (Wawancara 11 Juni 2024)

Dari yang disampaikan Risdiyanto, menerangkan bahwa memang masalah pemasaran masih menjadi satu persoalan yang dihadapi oleh para pelaku usaha. Terlebih khusus bagi para pelaku usaha yang menekuni usaha kuliner/jajanan yang setiap hari selalu berkeliling untuk menitipkan produk mereka pada kios/ruko/toko oleh-oleh yang pada gilirannya tidak maksimal dan tentu saja memakan ongkos lebih dalam prosesnya. Lebih lanjut, berkaitan BUMKal yang dalam tahapan pembangunan kembali oleh Kalurahan Wiladeg – hal menjadi peluang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah kalurahan bersama para pelaku

usaha yang dengan di intergasikan BUMKal sebagai mitra atau kolabotor yang kemudian dapat memaksimal potensi pengembangan yang ada – BUMKal dapat di gunakan sebagai mitra dalam penjajakan hasil produksi melalui ruko/kios desa yang ada, bahkan yang berkaitan dengan modal usaha juga dapat difasilitasi BUMKal yang ada di Kalurahan Wiladeg.

Dari uraian di atas dan pengamatan peneliti, menyimpulkan bahwa dalam Implementasi Program Desa Preneur pemerintah belum ada hubungan antar lembaga yang di bangun sehingga pada pelaksanaannya para pelaku usaha masih menghadapi kendala-kendala yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan dalam pengembangan usaha merek – misalnya terkait soal perizinan. Maka, berkenaan dengan hambatan tersebut pemerintah dapat membangun dengan berbagai lembaga atau instansi agar proses perizinan dapat lebih mudah, sehingga para pelaku usaha dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya tanpa bersusah payah dalam mengurus masalah perizinan produk – tidak hanya itu saja, manfaat dari adanya izin tersebut dapat menjadi satu bentuk bahwa jenis-jenis usaha yang ada sudah memenuhi syarat-syarat kelayakan yang menjadi satu branding tersendiri bagi konsumen.

C. Sumberdaya Guna Implementasi Program Desa Preneur

Dalam Setiap kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah atau organisasi membutuhkan dukungan sumber daya yang memadai untuk dapat diimplementasikan secara efektif dan efesien. Sumber daya yang dimaksud

mencakup berbagai aspek, mulai dari anggaran, tenaga kerja/kompetensi implementator, hingga teknologi dan infrastruktur. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, kebijakan yang baik sekalipun dapat gagal mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan demikian maka sumberdaya yang menjadi sangat penting dalam implementasi sebuah kebijakan. Berkaitan dengan implementasi program desa preneur di Kalurahan Wiladeg, dukungan sumberdaya dalam berjalannya program desa preneur menjadi sangat penting – baik dalam konteks kebijakan pendukung, produk hukum dan sumberdaya manusia yang kompeten baik secara kualitas maupun kuantitas diperlukan guna menjalankan program, pada konteks sumberdaya manusia hal ini dapat dikondisikan melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas dalam rangka memastikan tenaga/sumberdaya dapat berjalan secara optimal – dikarenakan manusia disisi lain sebagai subyek implementasi, sekaligus sebagai objek kebijakan. Maka berkaitan dengan sumberdaya dijelaskan oleh Nurtika Fitria Reni selaku Carik Kalurahan Wiladeg, sebagai berikut:

“jadi kami (Pemerintah Kalurahan Wiladeg) untuk mendukung program ini kemarin ada pelatihan tentang manejerial usaha, pelatihan *packing*, terus tentang proses perizinan juga sudah. Jadi kami bantu itu untuk bagaimana desa preneur ini maju”. (wawancara 10 Juni 2024)

Dari hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa dalam rangka mendukung program desa preneur, pemerintah pada gilirannya melaksanakan pelatihan-pelatihan yang diperuntukan untuk menyiapkan sumberdaya manusia yang berkompetensi dalam implementasi program desa

preneur. Dengan adanya pelatihan para pelaku usaha diharapkan memiliki keterampilan lebih dalam peningkatan kualitas produk/jasa dan juga proses manajemen usahanya masing-masing. Apalagi dengan penggunaan teknologi informasi yang masif dapat dimanfaatkan sebagai arena penjualan yang tidak terbatas.

Selanjutnya, berkaitan dengan sumberdaya dalam mendukung sebuah implementasi, tentu tidak hanya soal sumberdaya manusia saja – seorang implementator tidak akan berdaya apabila tanpa dukungan sumberdaya lain, baik sumberdaya finansial maupun sumberdaya material lainnya. sumberdaya yang maksud ialah bagaimana dukungan para aktor politik dalam hal ini, pemerintah yang memiliki otoritas atas sumberdaya finansial yang diturunkan dalam bentuk kebijakan/peraturan yang diperuntukan untuk mendukung efektivitas sebuah program dalam implementasinya. Begitu pada konteks implementasi program desa preneur di Kalurahan Wiladeg. Maka berkaitan dengan hal tersebut akan jelaskan oleh Kaniyo selaku Lurah Kalurahan Wiladeg, sebagai berikut:

“kaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana alhamdulillah kita sudah masuk rancangan untuk pengadaan tenda, nanti pengennya supaya mudah pemasaran nya begitu – tapi belum realisasi, tapi sudah masuk rancangan karena untuk dana is (Dana Keistimewaan) masih kurang, jadi belum jadi kami bangun”. (wawancara 10 Juni)

Dari pernyataan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa memang dalam rangka mendukung implementasi program preneur – pemerintah kalurahan sudah menjalankan fungsinya sebagai fasilitator, yang dimana berangkat dari

kebutuhan para pelaku usaha, pemerintah kalurahan mengadakan sarana berupa tenda pemasaran yang dimuat dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2024, meskipun belum sampai pada tahap realisasi dikarenakan keterbatasan anggaran. Lebih lanjut, keterbatasan anggaran ini kemudian menjadi faktor penghambat – seperti yang diketahui bahwa, sumberdaya finansial memainkan peran krusial, tanpa anggaran program Cuman sebatas dokumen belaka, maka dari itu melihat dukungan sumberdaya dari pihak yang memiliki otoritas menjadi sangat penting baik dari pihak pemerintah kalurahan sampai pada pemerintah provinsi. Selanjutnya, berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana disinggung oleh Tyas Nur Meida selaku Sekretaris Kelompok Preneur, sebagai berikut:

“sebenarnya kita sangat senang kalau di fasilitasi untuk pendampingan sama pelatihan, tapi kita harapannya mungkin itu kaitan dengan permodalan alat mas, soalnya kalo untuk bahan baku kita sendiri bisa mengadakan. Mungkin kalau ada dibantu permodalan alat bisa membantu biar makin maju”. (Wawancara 11 Juni 2024).

Dari hasil wawancara di atas, peneliti kemudian menyimpulkan bahwa memang pada pelaksanaan program desa preneur masih terbatas dalam hal bagaimana memenuhi/mamfasilitasi kebutuhan dari masing-masing pelaku usaha baik dalam hal sarana dan prasarana penunjang. Beberapa dari para pelaku usaha yang ada terkendala dalam hal alat produksi, ini disampaikan oleh Tyas Nur Meida pada peneliti – karena banyak dari pelaku usaha bergerak pada sektor makanan yang dikelola secara tradisonal, sehingga menghambat produktivitas produksi dari para pelaku usaha. Maka sudah menjadi kewajiban pemerintah

sebagai pemangku kebijakan untuk bagaimana memecahkan persoalan dan juga hambatan yang memengaruhi efektifitas implementasi kebijakan.

D. Karakteristik Dan Kemampuan Agen Pelaksana Program Desa Preneur

Dalam implementasi program atau kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah atau sebuah organisasi untuk menyasar hasil/outcome yang maksimal – sangat ditentukan pada apa yang disebut sebagai karakteristik dan kemampuan agen pelaksana program. Karakteristik dan kemampuan yang dimaksud adalah dinamika yang mempengaruhi sebuah implementasi program, baik itu mencakup struktur birokrasi, norma, sampai pada pola-pola hubungan yang terjadi dalam sebuah kebijakan – lebih lanjut untuk melihat karakteristik dan agen pelaksana pada konteks implementasi program desa preneur diantaranya, pertama adalah kompetensi teknis, yang dimaksud dengan kompetensi teknis ialah sebagai agen pelaksana penting memiliki pengetahuan ataupun keterampilan yang memadai guna melaksanakan tugas sesuai dari tujuan program secara efektif – hal ini juga kemudian tidak hanya sebatas atribut pelaksana semata, melainkan kompetensi teknis yang dimiliki dapat modal dalam memotivasi dan memberdayakan lingkungan tempat kebijakan pada subyek lain (para pelaku usaha) yang ada di lingkungan program desa preneur di Kalurahan Wiladeg. Berkaitan dengan hal tersebut, disampaikan oleh Tyas Nur Meida selaku Sekretaris Kelompok Preneur, sebagai berikut:

“kalau kamarin itu pada saat perekrutan – kita melakukan musyawarah bersama kalurahan. yang ditarik (mengisi kepengurusan inti) itu kayaknya memang untuk sudah punya ijin dan agak ngerti soal IT (menguasai teknologi)”. (wawancara 11 Juni 2023).

Dari pernyataan Tyas Nur Meida di atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa pada proses pembentukan kelompok usaha desa preneur yang dilakukan, melalui mekanisme yang demokratis, yakni melalui forum musyawarah yang pada perekrutan pelaku usaha untuk mengisi kepengurusan menyesuaikan dengan keterampilan yang dimiliki anggota, ini merupakan satu strategi guna memanfaatkan keterampilan yang sudah dimiliki untuk bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi pasar yang berkembang – yang mana dengan masifnya era digitalisasi turut memengaruhi pola transaksi dan pemasaran baik industri besar maupun industri kecil skala rumahan – bahkan dengan modal kompetensi yang disebutkan di atas bisa dimanfaatkan untuk memberdayakan rekan pelaku usaha yang masih dalam proses transisi. Namun, pada proses perjalanan tahun ke-3 program desa preneur di Kalurahan Wiladeg sejak diterbitkannya Surat Keputusan (SK) oleh pihak kalurahan, masih dikatakan belum maksimal, beberapa hal ini ditandai dengan melihat bagaimana output/keluaran dari capaian program yang masih jauh dari kata sukses. Maka berkaitan dengan hal tersebut disampaikan langsung oleh Nurtika Fitria Reni selaku Carik, sebagai berikut:

“kalau kaitannya dengan hambatan, karena di preneur ini cukup banyak jenis jenis usaha yang gabung. Jadi dari segi pemasaran

cukup sulit, banyak yang belum bisa, paling yang sudah itu produk-produk kerajinan. Karena kalau makanan itu susah karena tidak tahan lama, paling bisanya lewat COD (*cash on delivery*) sekitar sini saja”. (wawancara 10 Juni 2024).

Melihat hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan berkaitan dengan bagaimana kompetensi dalam menggunakan ataupun dalam memanfaatkan platform digital sebagai basis pasar masih menjadi kendala para pelaku usaha yang ada di Kalurahan Wiladeg, khususnya para pelaku usaha yang terhimpun dalam kelompok desa preneur ini. Padahal dengan memanfaatkan digital marketing para pelaku usaha dapat menjangkau konsumen yang lebih luas tanpa harus dibatasi geografis, platform online seperti media sosial, e-commerce dan iklan digital memungkinkan produk untuk dikenal banyak orang, bahkan cenderung lebih murah dan efektif disbanding dengan metode konvensional. Maka untuk mengatasi persoalan yang ada, pemerintah harus dapat mendorong peningkatan kualitas dan keterampilan dari para pelaku usaha terkait mengelola dan menguasai digital marketing yang dapat dikondisikan melalui pendamping yang berkelanjutan. Lebih lanjut, berkaitan dengan persoalan keterampilan dalam pemanfaatan platform digital dalam pengembangan usaha dari kelompok desa preneur di Kalurahan Wiladeg. Disampaikan oleh Tyas Nur Meida, sebagai berikut:

“memang betul kalau dari pemasaran online kita masih kurang, karena kalau kita lihat banyak juga dari anggota ini sudah ibu-ibu (lansia) usahanya makanan yang terbiasa jualan biasa saja (tradisional), jadi untuk secara online juga saya kira kami (ibu-ibu) susah mau pakai.

Paling yang sudah online itu yang kerajinan”. (Wawancara 11 Juni 2024)

Maka dengan hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa keterbatasan dari para pelaku usaha dalam beradaptasi pada era globalisasi, khususnya dalam pemanfaatan platform digital, ditengarai oleh beberapa anggota sudah tak lagi berada diusia produktif. Banyak dari anggota kelompok preneur yang merupakan ibu-ibu lansia sehingga dalam memanejem usaha terbagi dengan urusan rumah tangga yang tidak dapat ditinggalkan dan menyesuaikan diri dengan arus kemajuan menjadi lambat, maka peneliti disini melihat faktor usia juga kemudian merupakan faktor krusial yang memengaruhi capaian dari sebuah kebijakan. Pelaksana yang muda dan produktif memiliki kemampuan lebih baik dari segi pengetahuan akan perkembangan dan juga dalam memunculkan inovasi-inovasi dalam menjawab kebutuhan pasar.

Selanjutnya, berkaitan dengan karakteristik dan kemampuan daripada unsur yang ada di dalam kelompok desa preneur wiladeg, melihat bagaimana anggota yang terlibat dalam kepengurusan adalah mereka yang merupakan penggerak utama dari pada untuk mencapai tujuan program desa preneur. Maka dengan pelatihan dan pendampingan yang diberikan selain sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan keterampilan, namun juga untuk menciptakan komitmen dalam mewujudkan iklim wirausaha yang berkualitas kompetitif. Namun pada pelaksanaannya, banyak dari pelaku usaha masih menempatkan usahanya sebagai hanya untuk mengisi waktu luang. Hal ini tentu tidak

mencerminkan komitmen dan semangat kuat dari para pelaku usaha dalam mengembangkan usaha Berkaitan dengan hal tersebut, disampaikan oleh Edy Susilo selaku Ulu-Ulu di Kalurahan Wiladeg, sebagai berikut:

“untuk kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan desa preneur, khususnya anggota kami memang, kita (pelaku usaha) belum bisa untuk usaha kita jadikan usaha pokok. Masih dalam keadaan hanya sekedar untuk menambah penghasilan saja”. (Wawancara 10 Juni 2024)

Dari pernyataan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa komitmen dan motivasi dalam pengembangan usaha yang ada kalurahan masih sangat lemah. Padahal modal pengetahuan dan juga pengalaman yang didapat dari pelatihan/pendampingan yang ada dan pengalaman sepanjang membangun usaha semestinya dapat menjadi pendorong dalam memajukan kualitas dan produktivitas dari para pelaku usaha. Orientasi utama dari pada program desa preneur ialah bagaimana menciptakan semangat dalam berwirausaha melalui peningkatan mutu dan juga kualitas baik barang dan jasa yang ada di Kalurahan Wiladeg sehingga dapat berdampak pada individu pelaku usaha maupun bagi sosial dalam hal menciptakan lapangan pekerjaan di wilayah perdesaan – tanpa adanya semangat dalam berwiraswasta, usaha akan berjalan di tempat atau tidak berkembang. Padahal dengan segala potensi yang ada seharusnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat atau dalam hal ini para pelaku UMKM.

Lebih lanjut, berkaitan dengan bagaimana peran pemerintah kalurahan yang juga merupakan unsur yang memainkan sentral dalam mengupayakan

targetan program tercapai dan juga yang memonitoring pelaksanaan program desa preneur itu sendiri. Dalam hal ini, para pelaku usaha yang sudah mendapatkan pelatihan dan juga pendampingan – harus senantiasa di dampingi dan memberikan support oleh pemerintah kalurahan, sehingga dengan upaya-upaya yang dibangun dapat memperbesar peluang akan mewujudkan desa yang memiliki kemampuan dalam mengeliatkan kegiatan kewirausahaan yang berbasiskan pada program desa preneur. Maka berkaitan dengan hal tersebut, di sampaikan oleh Purwanto selaku anggota kelompok usaha desa preneur wiladeg, sebagai berikut:

“kalau semisalnya dilihat sekarang, saya masih bingung kita sebenarnya mau menciptakan produk atau mau menciptakan lapangan pekerjaan. Kalo mau serius supaya bisa memajukan pelaku usaha, jadi pemerintah harus support. Kita habis pelatihan-pelatihan kok tidak ada tindak lanjutnya”. (wawancara 11 Juni 2024)

Dari hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa dalam implementasi program desa preneur yang ada di Kalurahan Wiladeg masih menyisakan satu mispersepsi dalam memaknai tujuan dari program desa preneur itu sendiri. Proses pendampingan dan juga monitoring paska pelatihan membuat para pelaku kebingungan dalam menindaklanjuti pengembangan usaha mereka. Lebih lanjut, dari pengamatan dan penulusran peneliti juga mendapati bahwa tidak ada satu program kerja bersama bagi para pelaku usaha dalam kelompok desa preneur – sehingga para pelaku hanya menjalankan pertemuan rutin yang dilaksanakan setiap bulan, yang pada pelaksanaannya pun hanya sebagai forum silaturahmi atau sebagai forum yang diadakan dalam mempersiapkan agenda/event tertentu.

Maka, dari hasil wawancara dan juga pengamatan peneliti dalam melihat bagaimana aspek karakteristik dan juga kemampuan dari agen pelaksana dalam implementasi program desa preneur di Kalurahan Wiladeg, masih perlu penguatan kapasitas bagi para pelaku usaha dan juga memasifkan proses monitoring dan support dari pihak Kalurahan Wiladeg. Lebih lanjut, Karakteristik dari para masing-masing unsur juga belum secara maksimal mengoptimalisasi capaian program – sementara itu, untuk penguatan kapasitas yang dimaksud ialah berkaitan dengan peningkatan kompetensi pelaku usaha dalam memanfaatkan platform digital – lebih lanjut, secara keanggotaan kelompok desa preneur juga perlu memerhatikan usia produktif dari aspek SDM. Disisi lain, pemerintah juga kemudian harus dapat menjadi unsur yang memainkan peran sentral dalam mengawal implementasi program desa preneur sesuai dengan tahapan-tahapan pengembangan dalam petunjuk teknis pelaksanaan program desa preneur – sehingga dapat memaksimalkan penerapan program dalam mengupayakan mewujudkan tujuan program desa preneur.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dalam bab penutup ini, peneliti akan menyimpulkan hasil penelitian dengan judul “Implementasi Program Desa Preneur Dalam Pengembangan Usaha Masyarakat di Kalurahan Wiladeg, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewah Yogyakarta”. Kemudian, dalam melihat bagaimana implementasi program desa preneur dalam mengembangkan dan memajukan usaha-usaha yang ada di Kalurahan Wiladeg tersebut ditinjau berdasarkan empat variabel yang mempengaruhi ketercapaian dari program desa preneur, yakni Kondisi Lingkungan Implementasi, Hubungan Antar Organisasi, Sumberdaya Guna Implementasi, dan Karakteristik dan Kemampuan dari Agen Pelaksana. Oleh karena itu, kesimpulan mengenai ketiga prinsip tersebut peneliti uraikan lebih lanjut dibawah ini:

Pertama, dalam temuan peneliti, terkait dengan Kondisi Lingkungan Tempat Pelaksanaan yang memang menjadi satu variabel yang tidak dapat lepaskan dalam melihat bagaimana keberhasilan dari capaian sebuah program ataupun kebijakan yang dibuat. Dalam temuan peneliti, melihat bahwa aspek dukungan masyarakat terhadap program sudah cukup baik. Artinya, bahwa para pelaku usaha yang ada di Kalurahan Wiladeg cukup antusias dalam terlibat dalam perberdayaan pelaku usaha berbasis pada program desa

preneur, hal ini dilihat dari para pelaku usaha yang terlibat dalam kelompok usaha preneur wiladeg berisikan pelaku usaha dari beberapa padukuhan yang ada. Hal ini tentu berkenaan dengan aspek dukungan dari pelaku usaha dari lintas padukuhan yang ada. Kemudian hal-hal lain yang menjadi aspek pendukung ialah terkait dukungan potensi yang ada di wiladeg, area kalurahan yang dilintasi jalan provinsi sekaligus menjadi area lalu lalang masyarakat yang berwisata ke Goa Pindul dan Umbul Banteng menjadi satu modal yang menjadi alasan kuat masyarakat untuk terlibat dalam program desa preneur guna meningkatkan kualitas dan keterampilan lainnya yang dapat memajukan usaha.

Namun, dalam implementasinya juga peneliti menemukan permasalahan yang turut menyertai proses pelaksanaan program desa preneur, masalah tersebut berkaitan partisipasi. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa partisipasi cukup baik – namun cukup baik saja bagi peneliti tidak cukup untuk, sebab program desa preneur memiliki satu targetan dalam hal bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi usaha dan kualitas para pelaku usaha yang ada di desa – yang tidak dapat diwujudkan tanpa adanya kerja sama yang menyeluruh dari setiap unsur yang berkepentingan. hal-hal yang mendasarinya pun karena proses sosialisasi yang tidak maksimal. Sehingga, hal ini berdampak program desa preneur pun terkesan tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap pengembangan usaha masyarakat

Kedua, berkaitan dengan Hubungan Antar Organisasi, hal ini menjadi suatu variabel penting dalam rangka mengupayakan memperkuat efektivitas dan juga efisiensi dari sebuah kebijakan/program melalui penguatan sinergitas antar lembaga berbasiskan pada komunikasi dan koordinasi lintas lembaga. Pada konteks ini, peneliti menemukan bahwa pada implementasi program desa preneur di Kalurahan Wiladeg tidak menjalin kemitraaan pada lembaga-lembaga tertentu dalam rangka mengoptimalkan implementasi program desa preneur itu sendiri – sehingga pada pelaksanaannya, para pelaku usaha yang sudah dibekali dengan berbagai pelatihan tidak dapat mengeksplorasi maupun mengembangkan usahanya masing-masing. Apalagi dengan lembaga seperti BUMKal yang dalam kondisi vakum atau tidak berjalan berdampak terhadap para pelaku usaha yang terkendala baik dalam hal lapak bagi pelaku usaha kuliner maupun dalam aspek permodalan – sehingga banyak dari pelaku usaha tidak dapat mengembangkan usahanya.

Ketiga, pada aspek Sumberdaya Guna Implementasi – peneliti kemudian menemukan bahwa dalam rangka menyiapkan dukungan sumberdaya manusia yang kemudian menjadi motor penggerak program atau kebijakan yang dibuat. Maka melalui Dinas Koperasi UKM DIY yang melakukan pelatihan dan pendampingan yang dilaksanakan secara intens berkerja sama dengan pemerintah Kalurahan Wiladeg – pelatihan yang adakan pun beragam, mulai dari proses manajemen usaha, pelatihan packing, dan juga proses perizinan. Lebih lanjut, berkaitan dengan dukungan sumberdaya guna

implementasi, pemerintah kalurahan pada gilirannya mencanangkan pengadaan prasarana pendukung bagi implementasi program desa preneur berupa pengadaan tenda penjualan yang muat dalam rancangan APBKal 2024. Namun, pada prosesnya banyak dari para pelaku usaha yang ada mengharapkan adanya dukungan sumberdaya finansial berupa modal usaha yang diperuntukan untuk mengembangkan usaha nya masing-masing.

Keempat, dalam temuan peneliti pada aspek Karakteristik dan Kemampuan Agen Pelaksanaan yang merupakan satu aspek vital yang berkaitan dengan kompetensi ataupun kemampuan dari seorang implementator dalam mengimplemtasikan sebuah kebijakan. Pada konteks implementasi program desa preneur di Kalurahan Wiladeg, pemerintah membentuk kelompok usaha khusus desa preneur yang berisikan para pelaku usaha yang memiliki jenis usaha yang berbeda-beda dan membuat struktur nya sendiri. Pada struktur yang dibuat pun misalnya Ketua sampai Pembina merupakan beberapa orang yang dari segi kualitas usahanya cukup maju, hal ini diharapkan agar para pelaku yang secara kualitas sudah lebih maju dapat menjadi cerminan ataupun contoh bagi para pelaku usaha lain berbekal pengalaman dan juga kemampuannya.

Namun, pada perkembangannya beberapa pelaku masih terkendala terkait kemampuan dalam memanfaatkan platform digital sebagai media pemasaran, hal ini tentu menjadi hambatan yang menghambat perkembangan dari usaha-usaha yang ada, apalagi banyak dari para pelaku usaha bergerak di

sektor makanan dan jajanan. Kemudian, persoalan lain yang turut dihadapi ialah terkait komitmen dan konsistensi dari pelaku usaha sendiri, yang mana banyak dari pelaku usaha masih menempatkan usahanya sebatas usaha sampingan dan lebih banyak memprioritaskan aktivitas pertanian, ini tidak sepenuhnya salah, namun berangkat dari output/keluaran capaian program desa preneur sendiri yang mengupayakan peningkatan kesejahteraan yang berbasiskan pada pengembangan usaha yang tentu saja memerlukan komitmen dan konsistensi, baik dari para pelaku usaha maupun pihak pemerintah.

B. Saran

Berangkat dari hasil penelitian yang telah peneliti uraikan pada bab sebelumnya dan uraian kesimpulan di atas, maka peneliti hendak memberikan beberapa catatan penting berupa saran terkait dengan “Implementasi Program Desa Preneur dalam Pengembangan Usaha Masyarakat di Kalurahan Wiladeg, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul”. Adapun saran peneliti, yaitu:

1. Dalam mengupayakan terwujudnya tujuan dari program desa preneur maka unsur partisipasi harus menjadi perhatian dari pemerintah kalurahan, setiap pelaku usaha yang ada harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh pelatihan dan pendampingan yang ada, sehingga proses pengembangan usaha tidak

kemudian terjadi secara sporadis. Sehingga masyarakat desa dapat memiliki pengaruh dalam meningkatkan perekonomian desa secara kolektif

2. Pemerintah juga perlu mengupayakan membangun hubungan kerja sama atau kemitraan dengan lembaga-lembaga lain untuk mendukung dan memperluas pengaruh ataupun jangkauan pasar bagi para pelaku usaha, misalnya dengan mempercepat pengaktifan BUMKal dan mengintegrasikan Kelompok Usaha Desa Preneur Wiladeg ke BUMKal Kalurahan Wiladeg.
3. Diluar dari pengadaan tenda yang upayakan oleh pemerintah Kalurahan Wiladeg, perlu juga kiranya mengakomodir keresahan daripada pelaku usaha terkait soal fasilitasi permodalan alat produksi. Hal ini menjadi penting karena keterbatasan modal tentu menjadi hambatan besar bagi pelaku usaha itu sendiri. Jika tidak dapat diadakan secara sekaligus, maka bisa dilakukan percobaan bagi beberapa usaha sesuai dengan potensinya masing-masing.
4. Kemudian yang terakhir, berkaitan dengan kemampuan ataupun kompetensi khususnya dari pelaku usaha yang ada, perlu kiranya memerhatikan aspek usia produktif dari pada para pelaku usaha itu sendiri, melihat komposisi yang ada dalam kelompok desa preneur yang didominasi oleh ibu-ibu rumah tangga yang mana tentu secara kemampuan dalam menggunakan atau mengoperasikan alat maupun

media elektronik sangat terbatas. Maka dari itu, perlu adanya restrukturalisasi dalam tubuh kepengurusan kelompok desa preneur dan membuka ruang bagi keterlibatan pemuda yang secara visi maupun kemampuan cukup familiar dalam memanfaatkan platform-platform media elektronik maupun media sosial yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. M., & Yusof, H. (2011). Quality in Qualitative Studies: The Case Of Validity, Reliability And Generalizability. *Issues in Sosial and Environmental Accounting* , 25-67.
- Arikunto, Suharsimi. 2014. *prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Herdiansa, A. Dkk. (2023). “Pengembangan Gula Aren Untuk Membangun Desa Preneur Di Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat”.1.1-5. e-ISSN: 2987-2561. <https://proceeding.unram.ac.id/index.php/wicara>.
- Hamid, R. (2018). “Pemberdayaan Ibu-Ibu Pkk Melalui Social Preneur Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Pettalandung”. *Dedikasi Masyarakat*. 2 (1).23-29. 2022.
- Jogiyanto Hartono, *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*, (Yogyakarta: Andi, 2018. hal. 193-194.
- Joko Subagyo, P. 2011. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Yogyakarta: Penerbit Rineka Cipta
- Maulina, L. Dkk. (2022). *Pengelolaan Desa Wisata Pandanrejo Menuju Desapreneur*. *Media Pariwisata* 20 (2), 233-248, 2022.
- Maliki, B. (2020). “Pengentasan Kemiskinan Melalui SocialPreneur Bagi Ibu-Ibu PKK”. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*. 2(2).1-8. <https://doi.org/10.46306/jabb.v2i2.10>.
- Munsyii, M. Dkk. (2022). “(SAKU) Sistem Akuntansi UMKM: Model Cloud Accounting System Sederhana sebagai Strategi Optimalisasi Pengembangan Desa Preneur”.2 (1).171-182.
- Rinuastuti, H., Saufi, A., Asmony, T., & Genadi, Y. (2023). *Pemberdayaan*

Masyarakat Desa Bengkaung Dalam Program Pengembangan DesaPreneur.

Prosiding

PEPADU,5(1),368373.<https://proceeding.unram.ac.id/index.php/pepadu/article/view/720>

Saputra, R. Dkk. (2023). Pengolahan Jagung Menjadi Produk Susu Jagung Instan Untuk Mendukung Program Desa Preneur Di Desa Suela Kecamatan Suwela Kabupaten Lombok Timur.1 (1).1-5.2023. e-ISSN: 2987-2561. Prosiding Seminar Nasional Gelar Wicara (unram.ac.id).

Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar

Sudirman, Dkk. 2022. “Kare –Kare: Pengembangan Desa Preneur Berbasis Inovasi Makanan Khas Lombok (Kare-Kare) Masyarakat Di Desa Sukadana Kecamatan Pujut Kabupaten Loteng Nusa Tenggara Barat”.Jurnal Pengabdian Inovasi Masyarakat Indonesia.1 (2), 66-69, 2022

Ulfatin, Nurul. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan Teori dan Aplikasinya*.Malang: Media Nusa Creative

Zainie, F. Dkk.(2023). Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Pengolahan Gula Aren Sebagai Produk Unggulan Di Desa Dasan Geria. 1 (2).1-5.2023. e-ISSN: 2987-2561 <https://proceeding.unram.ac.id/index.php/wicara>

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014tentang Desa

Peraturan Gubernur Daerah Istimewah Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2020
tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya

Peraturan Gubernur Daerah Istimewah Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2022
Tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Desa Preneur

Internet:

[https://www.kompas.com/skola/read/2023/01/06/220000369/pengertian-
implementasi-menurut-ahli#google_vignette](https://www.kompas.com/skola/read/2023/01/06/220000369/pengertian-
implementasi-menurut-ahli#google_vignette).20:07/2024

PEDOMAN WAWANCARA

Dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Program Desa Preneur dalam Pengembangan Unit Usaha Masyarakat” di Kalurahan Wiladeg, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewah Yogyakarta. Peneliti membuat pedoman wawancara sebagai berikut :

- a) Kondisi Lingkungan Tempat Pelaksanaan
 - 1. Bagaimana faktor lingkungan (kondisi desa dan masyarakat) mempengaruhi berjalannya program desa preneur?
 - 2. Apakah program desa preneur cocok di implementasikan di desa wiladeg?
 - 3. Bagaimana antusiasme masyarakat dalam merespons program desa preneur?
 - 4. Apa faktor pendukung dan penghambatnya?
- b) Hubungan antar lembaga implementasi
 - 1. Apakah ada kerja sama antar lembaga kalurahan dalam proses implementasi program desa preneur? Jika ada bagaimana itu dijalankan?
 - 2. Bagaimana proses koordinasi antar lembaga dilakukan?
- c) Sumberdaya Guna Implementasi
 - 1. Apa saja upaya yang dilakukan pemerintah kalurahan sebagai bentuk peningkatan dan juga pengembangan kualitas SDM daripada pelaku UMKM?
 - 2. Fasilitas apa saja yang disediakan untuk mendukung implementasi program desa preneur?
 - 3. Apa saja program atau kebijakan yang diperuntukan untuk mendukung program desa preneur
- d) Karakter dan Kemampuan Agen Pelaksanaan
 - 1. Apakah terdapat kualifikasi khusus pada orang-orang yang terlibat dalam implementasi program desa preneur, baik sebagai pengurus yang mengisi struktur maupun pada Pembina program ?
 - 2. Bagaimana proses manajemen kelompok desa preneur itu berjalan?

3. Apakah terdapat forum kolektif rutin yang dilakukan guna memantau dan juga mengevaluasi jalannya program desa preneur? Jika ada bagaimana prosesnya?

LAMPIRAN
FOTO/DOKUMENTASI PENELITIAN

NO	GAMBAR	KETERANGAN
1		<p>Bersama Bapak Kaniyo (Lurah Wiladeg) 10 Juni 2024</p>
2		<p>Bersama Bapak Risdiyanto (Ketua Kelompok Desa Preneur Wiladeg) 11 juni 2024</p>
3		<p>Bersama Bapak Edy Susilo (Pamong Kalurahan) 10 Juni 2024</p>

4		<p>Bersama Ibu Nurtika Fitria Reni (Carik Wiladeg) 10 juni 2024</p>
5		<p>Bersama Ibu Tyas Nur Meida (Sekretaris Kelompok Desa Preneur) 11 juni 2023</p>

6






Bersama Bapak Purwanto
(Anggota Prenuer)
11 juni 2023

7



Bersama Bapak Lilik
Prasetyo
(Pangripta Kalurahan
Wiladeg)
10 juni 2024

8		<p>Bersama Bapak Suko Rahmadi (Danarta Kalurahan Wiladeg) 11 juni 2024</p>
9		<p>Bersama Bapak Juhari (Pelaku UMKM) 19 juli 2024</p>
10		<p>Bersama Bapak Priyanto (Pelaku UMKM) 19 Juli 2024</p>



**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B**

• PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI BAIK SEKALI

• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI BAIK SEKALI
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER STATUS TERAKREDITASI BAIK SEKALI


Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id, e-mail : info@apmd.ac.id

**SURAT TUGAS
Nomor : 220/I/T/2024**

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta memberikan tugas kepada:

Nama : Ronald Umbu Hadanga
Nomor Mahasiswa : 19520167
Program Studi : Ilmu Pemerintahan.
Jenjang : Sarjana (S-1).
Keperluan : Melaksanakan Penelitian.
a. Tempat : Kalurahan Wiladeg, Kapanewon Karangmojo,
Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta
b. Sasaran : Implementasi Program Desa Preneur dalam
Pengembangan Usaha Masyarakat di Kalurahan
Wiladeg, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten
Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta
c. Waktu : 1 Bulan

Mohon yang bersangkutan diberikan bantuan seperlunya.

Yogyakarta, 3 Juni 2024
Ketua

Dr. Sutoro Eko Yunanto
NIY. 170 230 190

PERHATIAN :

Setelah selesai melaksanakan penelitian,
mohon surat tugas ini diserahkan kepada
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat
Desa "APMD" Yogyakarta.

MENGETAHUI :

Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Pejabat
Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa
tersebut telah melaksanakan penelitian.

Foto: Surat Tugas Penelitian



**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B**

• PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI PEMBAHANGUNAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI BAK SEKALI
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER STATUS TERAKREDITASI BAK SEKALI
Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp (0274) 561971, 550775, Fax (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id, e-mail : info@apmd.ac.id

Nomor : 441/I/U/2024
Hal : Permohonan ijin penelitian

Kepada Yth :
Lurah Wiladeg, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul
Di Tempat

Dengan hormat,
Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang namanya tersebut dibawah ini akan mengadakan penelitian lapangan dalam waktu 1 bulan. Penelitian tersebut oleh Mahasiswa yang bersangkutan digunakan dalam rangka penyusunan Skripsi yang hasilnya akan diperhitungkan untuk penelitian dalam kemampuan Studi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

Adapun nama Mahasiswa dan judul Penelitian adalah :

Nama : Ronald Umbu Hadanga
No Mhs : 19520167
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Implementasi Program Desa Preneur dalam Pengembangan Usaha Masyarakat di Kalurahan Wiladeg, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Tempat : Kalurahan Wiladeg, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Dosen Pembimbing : Dra. B. Hari Saptaning Tyas, M.Si

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengharapkan kesediaan Bapak/ Ibu untuk berkenan memberikan izin serta bantuan fasilitas seperlunya guna memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.

Atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.


Yogyakarta, 3 Juni 2024
Ketua

Dr. Sutoro Eko Yunanto
NID. 170 230 190

Foto: Surat Ijin Penelitian



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON KARANGMOJO
PEMERINTAH KALURAHAN WILADEG

Jl. Wonosari Karangmojo km. 6 telpn 0274-393352 kode pos 55891
Website: www.wiladeg-karangmojo.desa.id

Wiladeg, 12 Juni 2024

Nomor : 400.10.5.5/92a

Lamp. : -

Hal : Izin Penelitian

Kepada Yth.

Pimpinan STPMD APMD Yogyakarta

Di Yogyakarta

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat dari SPMD APMD Yogyakarta Nomor 441/II/U/2024 tentang Permohonan Izin Penelitian, dengan ini Pemerintah Kalurahan Wiladeg memberikan izin untuk melakukan penelitian kepada :

nama : RONALD U. HADANGA
NIM : 19520167
program studi : Ilmu Pemerintahan

untuk melaksanakan penelitian dan pengumpulan data untuk penulisan skripsi dengan judul "Implementasi Program Desa Preneure dalam Pengembangan Usaha Masyarakat di Kalurahan Wiladeg".

Demikian surat ini kami sampaikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. Lurah Wiladeg,

Carik



NURTIKA FITRIA RENI, S.T.

Foto: Surat Balasan Penelitian Dari Kalurahan Wiladeg



Lumbung Desa STPMD "APMD"
Perpustakaan Selanjut Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"
Jl. Timoho 317 Gondokusuman Yogyakarta 55225
Email: perpustakaan@gmail.com telp/WA: 0851-7320-3177

TANDA TERIMA CEK PLAGIASI

Tanda terima ini menyatakan bahwa Lumbung Desa Perpustakaan STPMD "APMD" telah menerima makalah anda dan telah memeriksanya melalui perangkat lunak Turnitin dengan rangkuman berikut:

Penulis Makalah : Ronald umbu hadanga
Judul Makalah: Implementasi program desa preneur dalam pengembangan usaha Masyarakat di kalurahan wiladeg, kepanewon karangmojo, kabupaten Gunung kidul, daerah istimewa yogyakarta
Tanggal pemeriksaan: 31 Juli 2024
Persentase plagiasi: 17%



Petugas: Bagusprasetyo

Checked By:



Foto: Tanda Cek Plagiasi